

Katalog: 9302023.5103

PRODUK DOMESTIK REGIONAL BRUTO KABUPATEN BADUNG

MENURUT PENGELUARAN

2019-2023



BADAN PUSAT STATISTIK
KABUPATEN BADUNG

Katalog: 9302023.5103

**PRODUK DOMESTIK REGIONAL BRUTO
KABUPATEN BADUNG
MENURUT PENGELUARAN
2019-2023**

<https://badungkab.bps.go.id>



**BADAN PUSAT STATISTIK
KABUPATEN BADUNG**

Produk Domestik Regional Bruto Kabupaten Badung Menurut Pengeluaran 2019-2023

Katalog	: 9302023.5103
ISBN	: 978-602-6995-49-0
No. Publikasi	: 51030.24010
Ukuran Buku	: 14,8 cm X 21 cm
Jumlah Halaman	: xii + 105 halaman
Penyusun Naskah	: BPS Kabupaten Badung
Penyunting	: BPS Kabupaten Badung
Pembuat Kover	: BPS Kabupaten Badung
Penerbit	: ©BPS Kabupaten Badung
Dicetak oleh	: CV. Bhineka Karya
Sumber Ilustrasi	: canva.com

Dilarang mereproduksi dan/atau menggandakan sebagian atau seluruh isi buku ini untuk tujuan komersial tanpa izin tertulis dari Badan Pusat Statistik Kabupaten Badung.

Tim Penyusun
Produk Domestik Regional Bruto Kabupaten Badung
Menurut Pengeluaran 2019-2023

Pengarah

Komang Bagus Pawastra, SE, MT, MA

Penanggung Jawab

Ayu Manik Pratiwi, SST., M.Si

Penyunting

Ayu Manik Pratiwi, SST., M.Si

Penulis Naskah

Nadiya Nur Husniyya, S.Tr.Stat.

Penata Letak

Nadiya Nur Husniyya, S.Tr.Stat.

Desain Kover

Nadiya Nur Husniyya, S.Tr.Stat.



KATA PENGANTAR

Puji syukur kami panjatkan kehadiran Tuhan Yang Maha Esa, karena atas karunia-Nya publikasi **Produk Domestik Regional Bruto Kabupaten Badung Menurut Pengeluaran Tahun 2019-2023** dapat diselesaikan tepat pada waktunya. Publikasi ini khusus membahas mengenai PDRB menurut pendekatan pengeluaran. Data PDRB pada publikasi ini menggunakan tahun dasar 2010 dan sudah menerapkan konsep *System of National Accounts 2008* sesuai dengan rekomendasi *United Nations*.

Menurut teori ekonomi makro, penghitungan PDRB dapat dilakukan melalui tiga pendekatan, yaitu: pendekatan produksi/penyediaan (PDRB menurut Lapangan Usaha/industri), pendekatan pengeluaran/permintaan akhir (PDRB menurut pengeluaran/expenditure) serta pendekatan pendapatan (PDRB menurut pendapatan/income). Ketiga pendekatan penghitungan tersebut secara teori akan menghasilkan angka PDRB yang sama.

Komponen yang tercakup dalam PDRB menurut pengeluaran yaitu Pengeluaran Konsumsi Rumah Tangga, Pengeluaran Konsumsi Lembaga Non Profit yang Melayani Rumah Tangga, Pengeluaran Konsumsi Pemerintah, Investasi (Pembentukan Modal Tetap Bruto dan Perubahan Inventori), Ekspor dan Impor. Besaran setiap komponen ditampilkan dalam analisis deskriptif, yang diharapkan dapat menggugah minat para pengguna data baik penentu kebijakan maupun kalangan akademisi.

Akhir kata, kami ucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah membantu penyelesaian publikasi ini. Semoga dapat bermanfaat untuk memenuhi kebutuhan semua pihak yang memerlukan. Kritik dan saran sangat kami perlukan untuk penyempurnaan publikasi sejenis di masa yang akan datang.



Mangupura, April 2024
Badan Pusat Statistik Kabupaten Badung
Kepala,

Komang Bagus Pawastra, SE, MT, MA

<https://badungkab.bps.go.id>



DAFTAR ISI

Produk Domestik Regional Bruto Kabupaten Badung Menurut Pengeluaran, 2019-2023

KATA PENGANTAR	v
DAFTAR ISI	vii
DAFTAR TABEL	ix
DAFTAR LAMPIRAN	xi
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1 Pengertian Pendapatan Regional	3
1.2 Perubahan Tahun Dasar PDRB	8
BAB II METODE ESTIMASI DAN SUMBER DATA	17
2.1 Pengeluaran Konsumsi Akhir RumahTangga	19
2.2 Pengeluaran Konsumsi Akhir LNPRT	22
2.3 Pengeluaran Konsumsi Akhir Pemerintah ..	25
2.4 Pembentukan Modal Tetap Bruto (PMTB) .	29
2.5 Perubahan Inventori	33
2.6 Ekspor Impor.....	38
BAB III TINJAUAN EKONOMI KABUPATEN BADUNG	41
3.1 Tinjauan Agegat PDRB Kabupaten Badung Menurut Pengeluaran	44
3.2 Perkembangan Konsumsi Akhir Rumah Tangga.....	53
3.3 Perkembangan Konsumsi Akhir LNPRT	59
3.4 Perkembangan Konsumsi Akhir Pemerintah	60
3.5 Perkembangan Pembentukan Modal Tetap Bruto	64
3.6 Perkembangan Perubahan Inventori	67
3.7 Perkembangan Net Ekspor Barang Dan Jasa Luar Negeri.....	69

BAB IV	PERKEMBANGAN AGREGAT PDRB KABUPATEN	
	BADUNG MENURUT PENGELUARAN.....	73
4.1	PDRB (Nominal).....	75
4.2	Perbandingan Pengeluaran PDRB Untuk Konsumsi Akhir Rumah Tangga Terhadap Net Ekspor.....	79
4.3	Perbandingan Konsumsi Akhir Rumah Tangga Terhadap PMTB	81
4.4	Proporsi Konsumsi Akhir Terhadap PDRB ..	82
4.5	Perbandingan Net Ekspor Terhadap PMTB	84
4.6	Neraca Perdagangan (Trade Balance)	86
4.7	Incremental Capital Output Ratio (ICOR) ...	88
BAB V	PENUTUP	91
5.1	Kesimpulan	93
5.2	Saran	95
LAMPIRAN	97

DAFTAR TABEL

TABEL 1.	PDRB Atas Dasar Harga Berlaku Menurut Pengeluaran Kabupaten Badung, 2019-2023 (Miliar Rp).....	45
TABEL 2.	PDRB Atas Dasar Harga Konstan 2010 Menurut Pengeluaran Kabupaten Badung, 2019-2023 (Miliar Rp).....	46
TABEL 3.	Distribusi PDRB ADHB Menurut Pengeluaran Kabupaten Badung, 2019-2023 (Persen).....	48
TABEL 4.	Pertumbuhan PDRB ADHK 2010 Menurut Pengeluaran Kabupaten Badung, 2019-2023 (Persen).....	50
TABEL 5.	Indeks Implisit PDRB Menurut Pengeluaran Kabupaten Badung, 2019-2023.....	52
TABEL 6.	Perkembangan Penggunaan Konsumsi Akhir Rumah Tangga Kabupaten Badung, 2019-2023.....	55
TABEL 7.	Struktur Komponen Konsumsi Akhir Rumah Tangga Kabupaten Badung, 2019-2023.....	57
TABEL 8.	Pertumbuhan Implisit (Indeks Harga) Penggunaan Konsumsi Akhir Rumah Tangga Kabupaten Badung, 2019-2023.....	58
TABEL 9.	Perkembangan Penggunaan Konsumsi LNPRT Kabupaten Badung, 2019-2023 (Miliar Rupiah).....	60
TABEL 10.	Perkembangan Pengeluaran Konsumsi Akhir Pemerintah Kabupaten Badung, 2019-2023.....	61

TABEL 11.	Perkembangan dan Struktur PMTB Kabupaten Badung, 2019-2023.....	65
TABEL 12.	Perkembangan dan Struktur Perubahan Inventori Kabupaten Badung, 2019-2023.....	68
TABEL 13.	Perkembangan Net Ekspor Barang dan Jasa Kabupaten Badung, 2019-2023.....	70
TABEL 14.	Produk Domestik Regional Bruto dan PDRB Perkapita Kabupaten Badung, 2019-2023.....	76
TABEL 15.	Perbandingan PDRB Pengeluaran untuk Konsumsi Akhir Rumah Tangga terhadap Net Ekspor, 2019-2023.....	80
TABEL 16.	Perbandingan Konsumsi Rumah Tangga terhadap PMTB, 2019-2023.....	82
TABEL 17.	Proporsi Total Penggunaan Konsumsi Akhir terhadap PDRB Kabupaten Badung, 2019-2023.....	83
TABEL 18.	Rasio Net Ekspor terhadap PMTB (ADHB), 2019-2023.....	85
TABEL 19.	Neraca Perdagangan Barang dan Jasa Kabupaten Badung, 2019-2023.....	87
TABEL 20.	<i>Incremental Capital Output Ratio</i> Kabupaten Badung, 2019-2023.....	89



DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1.	Produk Domestik Regional Bruto Atas Dasar Harga Berlaku Menurut Pengeluaran Kabupaten Badung, 2019-2023 (Juta Rupiah).....	99
Lampiran 2.	Produk Domestik Regional Bruto Atas Dasar Harga Konstan 2010 Menurut Pengeluaran Kabupaten Badung, 2019-2023 (Juta Rupiah).....	100
Lampiran 3.	Distribusi Persentase Produk Domestik Regional Bruto Atas Dasar Harga Berlaku Menurut Pengeluaran Kabupaten Badung, 2019-2023 (persen).....	101
Lampiran 4.	Laju Pertumbuhan Produk Domestik Regional Bruto Atas Dasar Harga Konstan 2010 Menurut Pengeluaran Kabupaten Badung, 2019-2023 (persen).....	102
Lampiran 5.	Indeks Harga Implisit Produk Domestik Regional Bruto (2010 = 100) Menurut Pengeluaran Kabupaten Badung, 2019-2023.....	103
Lampiran 6.	Laju Pertumbuhan Indeks Harga Implisit Produk Domestik Regional Bruto (2010 = 100) Menurut Pengeluaran Kabupaten Badung, 2019-2023.....	104



Bab 1

Pendahuluan


<https://badungkab.go.id>



1.1 Pengertian Pendapatan Regional

Produk Domestik Regional Bruto menurut pengeluaran (PDRB Pengeluaran) merupakan salah satu bentuk tampilan data ekonomi suatu wilayah, di samping bentuk tampilan lain seperti PDRB menurut lapangan usaha, Tabel Input-Output, Sistem Neraca Sosial Ekonomi, dan Neraca Arus Dana. Di dalam sistem kerangka kerja (*frame work*) data ekonomi suatu wilayah, PDRB Pengeluaran merupakan ukuran dasar (*basic measure*) yang menggambarkan penggunaan atas barang dan jasa (*product*) yang dihasilkan melalui aktivitas produksi. Dalam konteks ini, PDRB Pengeluaran menggambarkan hasil “akhir” dari proses produksi yang berlangsung dalam batas-batas teritori suatu wilayah. Berbagai jenis barang dan jasa akhir tersebut akan digunakan untuk memenuhi permintaan akhir oleh pelaku ekonomi domestik maupun pelaku ekonomi dari luar wilayah bahkan dari luar negeri. Beberapa agregat penting dapat diturunkan dari PDRB Pengeluaran ini seperti variabel Pengeluaran Konsumsi Akhir, pembentukan modal tetap bruto atau investasi fisik, serta ekspor dan impor.

Penghitungan PDRB melalui pendekatan pengeluaran (*expenditure*) tidak terlepas dari penghitungan PDRB melalui pendekatan lapangan usaha (*production*). Sungguhpun demikian, PDRB Pengeluaran diestimasi secara independen dengan menggunakan data dasar yang relatif berbeda. PDRB Produksi menggambarkan aktivitas produksi, serta pendapatan yang diterima




pemilik faktor produksi yang terlibat (balas jasa faktor produksi)¹. Sedangkan PDRB Pengeluaran menggambarkan aktivitas pengeluaran yang dilakukan para pelaku ekonomi untuk mendapatkan barang dan jasa yang diproduksi tersebut. Melalui PDRB Pengeluaran juga dapat dilihat keterkaitannya dengan penyediaan barang dan jasa yang berasal dari domestik maupun dari impor. Melalui hubungan ini terlihat titik keseimbangan makro antara sisi penyediaan (*supply side*) dan sisi permintaan (*demand side*) barang dan jasa.

Secara konsep² penghitungan PDRB dari sisi yang berbeda di atas dimaksudkan untuk: i) memastikan konsistensi dan kelengkapan di dalam membuat estimasi; ii) memberi manfaat lebih di dalam melakukan analisis; dan iii) mengontrol kelayakan hasil estimasi. Secara teoritis, kedua pendekatan tersebut akan menghasilkan nilai yang sama besar (*equivalent*). Namun karena pendekatan estimasi dan metoda pengukuran yang digunakan berbeda, maka akan muncul selisih statistik (*statistical discrepancy*).

Dengan demikian PDRB Pengeluaran menjelaskan besarnya nilai barang dan jasa (*output*) yang dihasilkan dalam wilayah domestik, yang digunakan sebagai konsumsi “akhir” oleh masyarakat. Secara spesifik, yang dimaksud dengan konsumsi akhir


¹ Termasuk di dalamnya penyusutan dan pajak tidak langsung “neto” (pajak tidak langsung dikurangi subsidi)

² *Handbook of National Accounting. Accounting for Production: Sources and Methods (Series F no 30 United Nations)*



adalah penggunaan barang dan jasa yang tidak dimaksudkan untuk diproses lebih lanjut (dikonsumsi habis). Penggunaan produk akhir tersebut diwujudkan dalam bentuk “permintaan akhir”. Permintaan akhir yang dimaksud terdiri dari komponen-komponen Pengeluaran Konsumsi Akhir Rumah Tangga (PK-RT), Pengeluaran Konsumsi Akhir Lembaga Non Profit Yang Melayani Rumah Tangga (PK-LNPRT), Pengeluaran Konsumsi Akhir Pemerintah (PK-P), Pembentukan Modal Tetap Bruto (PMTB), Perubahan Inventori (PI), serta komponen Ekspor barang dan jasa.

Dalam menghasilkan barang dan jasa untuk memenuhi permintaan akhir masyarakat tersebut, tidak terlepas dari ketergantungan pada produk yang berasal dari dari luar wilayah atau luar negeri (impor). Berbagai barang dan jasa yang menjadi konsumsi akhir masyarakat di dalamnya akan terkandung produk impor. Sehingga dalam mengukur besarnya nilai tambah domestik (PDRB), komponen impor barang dan jasa harus dikeluarkan atau dikurangkan dari penghitungan konsumsi atau permintaan akhir. Tingginya permintaan tidak selalu diimbangi oleh penyediaan domestik, sehingga kondisi ini menjadi peluang bagi masuknya produk impor. Data empiris menunjukkan bahwa dari waktu ke waktu, perdagangan produk impor terus berkembang baik secara kuantitas, nilai, maupun ragamnya.



Secara konsep, PDRB Produksi (Y) sama besar dengan PDRB Pengeluaran (E), namun dalam kenyataannya tidaklah demikian. Selain berbeda dalam struktur atau komposisi, pendekatan pengukuran antar keduanya juga berbeda. Dalam penyajian data PDRB, perbedaan ini diletakkan pada sisi PDRB Pengeluaran. Unsur yang menyebabkan perbedaan tersebut antara lain adalah konsep dan basis pengukuran, metoda dan cakupan pengukuran, serta data dasar yang digunakan untuk estimasi. Melalui penjelasan ini para pengguna data PDRB tidak mempermasalahkan adanya perbedaan (*statistical discrepancy*) tersebut.

Penyusunan data **PDRB Pengeluaran** juga dimaksudkan untuk menjelaskan bagaimana “pendapatan” (Y) yang tercipta melalui proses produksi menjadi sumber pendapatan masyarakat³, yang akan digunakan untuk memenuhi kebutuhan konsumsi akhir.

Dari sudut pandang lain, PDRB Pengeluaran juga menjelaskan penggunaan dari sebagian besar produk domestik bruto untuk memenuhi kebutuhan konsumsi akhir, atau dengan istilah yang berbeda disebut sebagai “**output akhir (*final output*)**”. Mengaitkan antara pendapatan dan pengeluaran untuk pembelian barang dan jasa dari produk domestik maupun impor (termasuk untuk diekspor)


3. - Yang dimaksud adalah rumah tangga, pemerintah, lembaga non profit yang melayani rumah tangga serta sektor produksi (produsen) di wilayah domestik
- Disebut sebagai pendekatan “riil”
- Siklus ekonomi secara umum yang menjelaskan tentang hubungan antara balas jasa faktor produksi (pendapatan) dengan pengeluaran atas penggunaan berbagai produk barang dan jasa oleh faktor produksi tersebut

merupakan bentuk analisis yang sederhana dari data PDRB. Keharusan memiliki jumlah yang sama pada kedua model pendekatan PDRB tersebut, secara simultan dapat ditunjukkan melalui model atau persamaan *Keynesian* sebagai berikut:

$$Y = C + GFCF + \Delta \text{ Inventori} + X - M$$

<i>Y (Income)</i>	= PDRB Produksi
<i>C (Consumption)</i>	= Konsumsi akhir
<i>GFCF (Gross Fixed Capital Formation)</i>	= Pembentukan Modal Tetap Bruto
<i>\Delta Inventori</i>	= Perubahan Inventori
<i>X</i>	= Ekspor
<i>M</i>	= Impor

Persamaan di atas menunjukkan pendapatan atau nilai tambah bruto dari hasil penghitungan PDRB Produksi akan “identik” dengan PDRB Pengeluaran. Jika *Y* adalah pendapatan, *C* adalah konsumsi akhir, dan *GFCF* serta *\Delta Inventori* merupakan bentuk investasi fisik, maka selisih antara ekspor dengan impor menggambarkan surplus atau defisit dari aktivitas perdagangan barang dan jasa antar wilayah, baik dengan wilayah lain ataupun dengan luar negeri.




Melalui pendekatan ini dapat diketahui perilaku masyarakat dalam menggunakan pendapatan, apakah hanya untuk tujuan konsumsi (akhir) atau juga untuk tujuan investasi (fisik). Selain itu juga dapat diketahui besarnya ketergantungan ekonomi wilayah (domestik) terhadap luar negeri dalam bentuk perdagangan internasional (*external transaction*). Selisih antara ekspor dan impor juga disebut sebagai “ekspor neto”.

Sebagaimana PDRB Produksi, dari PDRB Pengeluaran juga dapat diturunkan berbagai data agregat tentang perekonomian wilayah seperti nilai nominal, struktur atau distribusi pengeluaran konsumsi akhir, pertumbuhan “riil”, serta indeks harga implisit. Data yang dimaksud tersedia baik untuk masing-masing komponen PDRB Pengeluaran maupun untuk total perekonomian.

1.2 Perubahan Tahun Dasar PDRB

Mengapa Tahun Dasar PDRB Perlu Diubah?

Selama sepuluh tahun terakhir, banyak perubahan yang terjadi pada kondisi perekonomian global maupun lokal, yang sangat berpengaruh terhadap perekonomian nasional. Krisis finansial global yang terjadi tahun 2008, penerapan perdagangan bebas antara China-ASEAN (CAFTA), perubahan sistem pencatatan perdagangan internasional, serta semakin meluasnya jasa layanan pasar modal merupakan beberapa contoh perubahan yang perlu diantisipasi dalam mekanisme pencatatan data statistik nasional.




Satu bentuk implementasi dari *System of National Accounts* (SNA) adalah melakukan perubahan tahun dasar PDB/PDRB. Di Indonesia kegiatan perubahan tahun dasar dari tahun 2000 ke 2010 dilakukan bersamaan dengan upaya mengimplementasi rekomendasi Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) yang tertuang dalam buku panduan SNA 2008. Kegiatan ini diawali dengan menyusun kerangka kerja dalam bentuk *Supply and Use Tables* (SUT) Indonesia untuk tahun data 2010. Dari kerangka SUT tersebut diperoleh nilai estimasi PDB dan komponen-komponennya. Selanjutnya nilai PDB maupun komponennya ini dijadikan sebagai acuan (*benchmark*) ketika BPS Provinsi maupun BPS Kabupaten/Kota menyusun PDRB-nya. Untuk itu, guna menjaga konsistensi dengan hasil penghitungan PDB, maka perubahan tahun dasar PDRB dilakukan secara simultan dengan perubahan tahun dasar PDB.

Apa yang Dimaksud dengan SNA 2008?

SNA 2008 merupakan rekomendasi internasional tentang tata cara pengukuran aktivitas ekonomi, yang telah sesuai dengan penghitungan konvensional berdasarkan prinsip-prinsip ekonomi. Rekomendasi dinyatakan dalam sekumpulan konsep, definisi, cakupan, dan klasifikasi, serta aturan neraca yang disepakati secara internasional dalam mengukur indikator ekonomi makro (*account*) seperti PDB/PDRB.

SNA dirancang guna menyediakan informasi tentang aktivitas yang dilakukan oleh para pelaku ekonomi, utamanya aktivitas



produksi, konsumsi, dan aktivitas akumulasi aset fisik. SNA dapat dimanfaatkan antara lain untuk kepentingan analisis, perencanaan dan penetapan kebijakan ekonomi. Melalui kerangka SNA, fenomena suatu perekonomian wilayah dapat dijelaskan dan dipahami dengan lebih baik.

Apa Manfaat Perubahan Tahun Dasar?


Manfaat perubahan tahun dasar PDRB di antaranya adalah:

- a. Menginformasikan kondisi ekonomi terkini, seperti terjadinya perubahan struktur dan pertumbuhan ekonomi;
- b. Meningkatkan kualitas PDRB;
- c. Menjadikan PDRB dapat diperbandingkan secara nasional.

Apa Implikasi Perubahan Tahun Dasar?

Perubahan tahun dasar PDRB antara lain berdampak pada:

- Meningkatkan nilai PDRB, yang pada gilirannya berpengaruh pada perubahan kelompok pendapatan (dari wilayah berpendapatan rendah menjadi menengah atau tinggi), serta pergeseran struktur ekonomi;
- Perubahan besaran indikator makro seperti rasio pajak, rasio hutang, rasio investasi dan tabungan, neraca perdagangan, serta struktur dan pertumbuhan ekonomi;
- Perubahan input data untuk keperluan *modeling* dan *forecasting*.



Mengapa Tahun 2010 sebagai tahun dasar?

Terpilihnya tahun 2010 sebagai tahun dasar didasarkan atas beberapa alasan sebagai berikut:

- Perekonomian Indonesia pada tahun 2010 relatif stabil;
- Terjadinya perubahan struktur ekonomi Indonesia selama 10 (sepuluh) tahun terakhir, terutama di bidang informasi, teknologi dan transportasi. Perubahan ini berpengaruh pada pola distribusi dan munculnya beberapa produk baru;
- Rekomendasi PBB tentang pergantian tahun dasar, yang harus dilakukan setiap 5 (lima) atau 10 (sepuluh) tahun⁴;
- Adanya pembaharuan konsep, definisi, cakupan, klasifikasi, sumber data, dan metodologi penghitungan sesuai rekomendasi SNA 2008;
- Tersedianya data dasar untuk meningkatkan kualitas PDRB seperti hasil Sensus Penduduk 2010 dan Indeks Harga Produsen (*Producers Price Index*);
- Tersedianya kerangka SUT Indonesia tahun 2010, yang menunjukkan keseimbangan antara produksi, konsumsi serta pendapatan yang tercipta dari aktivitas tersebut.


⁴ SNA1993, para 16.76: “constant price series should not be allowed to run for more than five, or at the most, ten years without rebasing”



Implementasi SNA 2008 dalam PDRB tahun dasar 2010


Terdapat 118 revisi di SNA 2008 dari SNA sebelumnya, dan 44 di antaranya merupakan revisi yang utama. Beberapa revisi yang diadopsi dalam penghitungan PDB/PDRB tahun dasar 2010 antara lain adalah:

- Konsep dan Cakupan
 - a. Sumber daya hayati (*cultivated biological resources/CBR*). *CBR* merupakan nilai aset alam hasil budidaya manusia, yang diperlakukan sebagai bagian dari output pertanian dan PMTB. Contoh nilai tegakan padi, kelapa sawit dan karet yang belum dipanen, serta nilai sapi perah yang belum menghasilkan.
 - b. Sistem persenjataan (*military weapon systems/MWS*). *MWS* merupakan nilai pengeluaran pemerintah untuk pengadaan alat pertahanan dan keamanan, yang diperlakukan sebagai bagian dari output industri peralatan militer dan PMTB seperti pesawat tempur, kendaraan lapis baja, dan peluru kendali.
 - c. Penelitian dan pengembangan (*research and development/RnD*). *RnD* merupakan nilai pengeluaran untuk aktivitas penelitian dan pengembangan, yang diperlakukan sebagai bagian dari output industri yang



melakukannya dan PMTB seperti *RnD* tentang varietas padi, produk otomotif, dan riset pemasaran.

- d. Eksplorasi dan evaluasi mineral (*mineral exploration and evaluation/MEE*). *MEE* merupakan nilai pengeluaran untuk aktivitas eksplorasi dan evaluasi barang tambang dan mineral, tanpa memperhitungkan apakah berhasil atau tidak menemukan cadangan tambang atau mineral. Biaya eksplorasi dan evaluasi diperlakukan sebagai bagian dari output industri pertambangan dan PMTB.
- e. Bank Sentral (*Central Bank/CB*). Aktivitas Bank Indonesia yang terkait dengan penyediaan jasa kebijakan moneter dan pengawasan dipisahkan dari jasa intermediasi keuangan. Aktivitas tersebut digabungkan dengan aktivitas penyediaan jasa regulasi yang dihasilkan pemerintahan.
- f. Komputer software (*computer software and databases/CSD*). *CSD* merupakan nilai pembelian atau biaya pembangunan *databases*, yang diperlakukan sebagai bagian dari output industri yang melakukannya dan PMTB.
- g. Produk kekayaan intelektual (*entertainment, literary or artistic originals/ELA*). *ELA* merupakan nilai pembelian atau biaya pembangunannya, yang diperlakukan sebagai bagian dari output industri yang melakukannya dan PMTB.



h. Pengeluaran untuk aktivitas eksplorasi dan evaluasi barang tambang dan mineral, tanpa memperhitungkan apakah kegiatan tersebut berhasil ataupun tidak berhasil menemukan cadangan tambang atau mineral. Biaya eksplorasi dan evaluasi diperlakukan sebagai bagian dari output industri pertambangan dan PMTB.

- Metodologi

Output jasa intermediasi keuangan. Output industri ini diestimasi dengan metoda FISIM (*Financial intermediation services indirectly measured / FISIM*). FISIM dihitung berdasarkan tingkat suku bunga simpanan (*deposits*), bunga pinjaman (*loans*), dan suku bunga referensi (*reference*). Metoda ini menggantikan metoda *Imputed Bank Services Charge (IBSC)*.

- Valuasi

Nilai tambah bruto lapangan usaha dinilai dengan harga dasar (*Basic Price*). Harga dasar merupakan harga keekonomian suatu barang atau jasa pada tingkat produsen, sebelum ada intervensi pemerintah dalam bentuk pajak dan subsidi atas produk.

- **Klasifikasi**

Klasifikasi yang digunakan adalah *Internasional Standard Industrial Classification (ISIC rev.4)* dan *Central Product Classification (CPC rev.2)*. BPS mengadopsi kedua jenis klasifikasi tersebut menjadi KBLI 2009 dan KBKI 2010.

Perubahan Klasifikasi PDRB Menurut Pengeluaran Tahun Dasar 2000 dan 2010

PDRB Tahun Dasar 2000	PDRB Tahun Dasar 2010
1. Pengeluaran Konsumsi Rumah tangga	1. Pengeluaran Konsumsi Rumah tangga
2. Pengeluaran Konsumsi Pemerintah	2. Pengeluaran Konsumsi LNPRT
3. Pembentukan Modal Tetap Bruto	3. Pengeluaran Konsumsi Pemerintah
4. Perubahan Inventori	4. Pembentukan Modal Tetap Bruto
5. Ekspor	5. Perubahan Inventori
6. Impor	6. Ekspor
	7. Impor



Bab 2

Metode Estimasi

Dan Sumber Data

<https://badungkab.go.id>

2.1 Pengeluaran Konsumsi Akhir Rumah Tangga

i. Pendahuluan

Sektor rumah tangga mempunyai peran yang cukup besar dalam perekonomian. Hal ini tercermin dari besarnya sumbangan komponen konsumsi rumah tangga dalam pembentukan PDRB pengeluaran⁵. Di samping berperan sebagai konsumen akhir barang dan jasa, rumah tangga juga berperan sebagai produsen serta penyedia faktor produksi untuk aktivitas produksi yang dilakukan oleh sektor institusi lainnya.


ii. Konsep dan definisi

Pengeluaran konsumsi rumah tangga (PKRT) adalah pengeluaran atas barang dan jasa oleh rumah tangga untuk tujuan konsumsi. Rumah tangga didefinisikan sebagai individu atau kelompok individu yang tinggal bersama dalam suatu bangunan tempat tinggal. Mereka mengumpulkan pendapatan, dapat memiliki harta dan kewajiban, serta mengkonsumsi barang dan jasa secara bersama-sama, utamanya kelompok makanan dan perumahan.

iii. Cakupan

PKRT mencakup pengeluaran atas barang dan jasa oleh rumah tangga residen, baik yang dilakukan di dalam maupun di luar wilayah domestik suatu *region*. Jenis barang dan jasa tersebut diklasifikasikan

⁵ Untuk Kabupaten/Kota yang mempunyai hasil tambang/industri/perkebunan dan nilai eksportnya sangat tinggi, umumnya nilai konsumsi rumah tangganya relatif lebih rendah



menurut *Classifications of Individual Consumption by Purpose (COICOP)*, sebagai berikut:

1. Makanan dan minuman tidak beralkohol
2. Minuman beralkohol, tembakau dan narkotik
3. Pakaian dan alas kaki
4. Perumahan, air, listrik, gas dan bahan bakar lainnya
5. Furniture, perlengkapan rumah tangga dan pemeliharaan rutin
6. Kesehatan
7. Angkutan
8. Komunikasi
9. Rekreasi/hiburan dan kebudayaan
10. Pendidikan
11. Penyediaan makan minum dan penginapan/hotel
12. Barang dan jasa lainnya

Namun dalam publikasi ini, PKRT hanya diklasifikasi ke dalam 7 COICOP, yaitu:

1. Makanan, Minuman, dan Rokok
2. Pakaian dan Alas Kaki
3. Perumahan, Perkakas, Perlengkapan dan Penyelenggaraan Rumah Tangga
4. Kesehatan dan Pendidikan
5. Transportasi, Komunikasi, Rekreasi, dan Budaya
6. Hotel dan Restoran



7. Lainnya

iv. Sumber Data


Data dasar yang digunakan untuk mengestimasi komponen PKRT bersumber dari:

- Survei Sosial Ekonomi Nasional/Daerah (Susenas/Suseda), BPS
- Survei Khusus Konsumsi Rumah tangga Triwulanan (SKKRT), BPS
- Sensus Penduduk 2010, BPS
- Data Sekunder (dari dalam maupun luar BPS)
- Indeks Harga Konsumen (IHK), BPS

v. Metoda Estimasi

Komponen PKRT Tahunan diestimasi dengan metoda sebagai berikut:

1. Nilai pengeluaran konsumsi perkapita Susenas/Suseda (untuk PKRT Tahunan)
2. Data poin 1 dikalikan dengan penduduk pertengahan tahun, dikalikan 12 (PKRT Tahunan)
3. Data poin 2 dikelompokkan menjadi 12 kelompok COICOP, dengan beberapa komoditas dikontrol secara tersendiri;
4. Terhadap data poin 3, dilakukan kontrol/koreksi dengan menggunakan data sekunder atau data/indikator suplai;

- 
5. Diperoleh nilai PKRT Tahunan atas dasar harga berlaku (atas dasar harga berlaku);
 6. Susun Indeks implisit PKRT berdasarkan IHK Kota (provinsi/kota terdekat);
 7. Nilai PKRT atas dasar harga konstan diperoleh dengan cara membagi hasil poin 5 dengan poin 6.

Catatan:

Komponen PKRT Triwulanan diestimasi menggunakan indeks perkembangan konsumsi rumah tangga triwulanan yang diperoleh dari hasil kegiatan SKKRT.

2.2 Pengeluaran Konsumsi Akhir LNPRT

i. Pendahuluan

Sektor Lembaga Non-Profit yang Melayani Rumah Tangga (LNPRT) muncul sebagai sektor tersendiri di dalam perekonomian suatu wilayah. Sektor ini berperan dalam menyediakan barang dan jasa bagi anggota maupun bagi kelompok rumah tangga tertentu secara gratis atau pada tingkat harga yang tidak berarti secara ekonomi. Harga yang tak berarti secara ekonomi artinya harga yang ditawarkan di bawah tingkat harga pasar (tidak mengikuti harga pasar yang berlaku).



ii. Konsep dan Definisi


LNPRT merupakan bagian dari lembaga non profit (LNP). Untuk diketahui, sesuai dengan fungsinya LNP dapat dibedakan atas LNP yang melayani rumah tangga (LNPRT) dan LNP yang melayani bukan rumah tangga.

LNPRT merupakan lembaga yang melayani anggota atau rumah tangga, serta tidak dikontrol oleh pemerintah. Anggota yang dimaksud bukan berbentuk badan usaha. LNPRT dibedakan atas 7 jenis lembaga, yaitu: Organisasi kemasyarakatan, Organisasi sosial, Organisasi profesi, Perkumpulan sosial/ kebudayaan/olahraga/hobi, Lembaga swadaya masyarakat, Lembaga keagamaan, dan Organisasi bantuan kemanusiaan/beasiswa.

iii. Cakupan

Nilai PK-LNPRT merupakan nilai output non-pasar yang dihasilkan oleh LNPRT. Nilai output non-pasar diestimasi berdasarkan nilai pengeluaran LNPRT dalam rangka melakukan kegiatan operasional. Pengeluaran yang dimaksud terdiri dari:

- a. Konsumsi antara, contoh: pembelian alat tulis dan barang cetakan; pembayaran rekening listrik, air, telepon, teleks, faksimili; biaya rapat, seminar, perjamuan; biaya transportasi, bahan bakar, perjalanan dinas; belanja barang dan jasa lainnya; sewa gedung, sewa perlengkapan kantor, dan lain-lain.

- 
- b. Kompensasi tenaga kerja, contoh: upah, gaji, lembur, honor, bonus dan tunjangan lain
 - c. Penyusutan
 - d. Pajak lainnya atas produksi (dikurangi subsidi), contoh: PBB, STNK, BBN, dan lain-lain.


iv. Sumber Data

- a. Survei Khusus Lembaga Nonprofit yang melayani Rumah tangga (SK-LNP), BPS
- b. SK-LNP Triwulanan (SK-LNPT), BPS
- c. Hasil *up-dating* direktori LNPRT, BPS
- d. Indeks Harga Konsumen, BPS

v. Metoda Estimasi

Komponen PK-LNPRT Tahunan diestimasi dengan metoda sebagai berikut:

1. Nilai pengeluaran konsumsi per jenis lembaga dari hasil SK-LNP;
2. Hasil dari poin 1 dikalikan dengan banyaknya lembaga pada pertengahan tahun dari Direktori LNPRT;
3. Terhadap hasil poin 2 dilakukan kontrol/koreksi dengan menggunakan indikator kegiatan hasil SK-LNP seperti jumlah tenaga kerja, penerima layanan, berbagai even seperti munas, rakerda, dan penanganan bencana;
4. Diperoleh nilai PK-LNPRT tahunan atas dasar harga berlaku (atas dasar harga berlaku);

- 
5. Susun Indeks implisit PK-LNPRT berdasarkan IHK Kota (Provinsi/Kota terdekat);
 6. Nilai PK-LNPRT atas dasar harga konstan (ADHK) diperoleh dengan membagi hasil poin 4 dengan poin 5.

Catatan:


Komponen PK-LNPRT Triwulanan diestimasi dengan menggunakan indeks perkembangan pengeluaran konsumsi LNPRT triwulanan yang diperoleh dari hasil kegiatan SK-LNPT.

2.3 Pengeluaran Konsumsi Akhir Pemerintah

i. Pendahuluan

Unit pemerintah merupakan unit institusi yang terbentuk melalui proses politik, serta mempunyai kekuasaan di bidang legislatif, yudikatif, dan eksekutif atas unit institusi lain yang berada di dalam batas-batas teritori suatu wilayah atau negara. Pemerintah juga berperan sebagai penyedia barang dan jasa bagi individu atau kelompok rumah tangga tertentu, pemungut dan pengelola pajak atau pendapatan lainnya, serta berfungsi untuk mendistribusikan pendapatan melalui aktivitas transfer. Dari sudut pandang lain, unit pemerintah terlibat dalam produksi non-pasar.

Dalam suatu perekonomian, unit pemerintah berperan sebagai konsumen maupun produsen barang dan jasa, serta sebagai regulator yang menetapkan kebijakan di bidang fiskal maupun




moneter. Sebagai konsumen, pemerintah akan melakukan aktivitas konsumsi. Sedangkan sebagai produsen, pemerintah melakukan aktivitas produksi dan investasi.

ii. Konsep dan Definisi

Nilai PK-P merupakan besarnya nilai barang dan jasa yang dihasilkan oleh pemerintah untuk dikonsumsi oleh pemerintah itu sendiri. Nilai tersebut diestimasi dengan pendekatan pengeluaran, yakni sebesar nilai pembelian barang dan jasa yang bersifat rutin, pembayaran kompensasi pegawai, transfer sosial dalam bentuk barang, perkiraan penyusutan barang modal, serta nilai output dari unit Bank Indonesia. Nilai ini masih harus dikurangi nilai penjualan barang dan jasa yang dihasilkan melalui unit produksi yang tak terpisahkan dari aktivitas pemerintahan secara keseluruhan. Aktivitas yang dimaksud mencakup aktivitas:

1. Memproduksi barang yang sejenis dengan barang yang diproduksi unit perusahaan seperti publikasi, kartu pos, reproduksi karya seni, dan pembibitan tanaman di kebun percobaan. Aktivitas menghasilkan barang-barang semacam itu bersifat insidental dan di luar fungsi utama dari unit pemerintah.
2. Memproduksi jasa, seperti penyelenggaraan rumah sakit, sekolah, perguruan tinggi, museum, perpustakaan, tempat rekreasi dan penyimpanan hasil karya seni yang dibiayai oleh pemerintah. Dalam praktek, pemerintah akan memungut



biaya, namun umumnya biaya yang dikenakan tidak akan melebihi seluruh biaya yang dikeluarkan pemerintah. Pendapatan yang diperoleh dari aktivitas semacam ini disebut sebagai penerimaan non-komoditi atau pendapatan jasa.

iii. Cakupan


Sektor pemerintah terdiri dari pemerintah pusat dan pemerintah daerah. Dalam melakukan aktivitasnya, pemerintah kabupaten/kota mengacu pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) masing-masing.

PK-P kabupaten/kota mencakup: a). PK-P desa/kelurahan/nagari yang ada di wilayah kabupaten/kota; b). PK-P kabupaten/kota yang bersangkutan; c). PK-P pusat yang merupakan bagian dari PK-P kabupaten/kota.

iv. Sumber Data

Data dasar yang digunakan untuk mengestimasi PK-P kabupaten/kota tahunan adalah:

- a. Data realisasi APBD Tahunan, Kementerian Keuangan dan Bappeda
- b. Statistik Keuangan Daerah, BPS
- c. Output Bank Indonesia, Bank Indonesia

- 
- d. Gaji Pegawai Negeri Sipil, Kementerian Keuangan dan Bappeda
 - e. Indeks Harga dan Indeks Upah, BPS
 - f. Indeks perkembangan pengeluaran pemerintah daerah triwulanan, BPS

v. Metode Estimasi

Komponen PK-P kabupaten/kota Tahunan diestimasi dengan menggunakan metoda:

PK-P atas dasar harga berlaku = Output + Penjualan barang dan jasa + *Social transfer in kind purchased market production* + Output Bank Indonesia

Output non pasar dihitung melalui pendekatan biaya operasional, seperti belanja pegawai, belanja barang, belanja bantuan sosial dan belanja lain-lain.

Catatan:


1. Komponen PK-P Triwulanan diestimasi dengan menggunakan indeks perkembangan pengeluaran konsumsi pemerintah daerah triwulanan
2. PK-P atas dasar harga konstan diestimasi dengan mendeflate PK-P atas dasar harga berlaku dengan menggunakan deflator berikut:

Jenis Belanja	Deflator	Keterangan
Belanja Pegawai	Indeks Upah	Sama dengan Nasional
Belanja Barang	IHPB umum tanpa ekspor	Sama dengan Nasional
Penyusutan	Indeks Implisit PMTB	
Belanja Bansos	IHPB umum tanpa ekspor	Sama dengan Nasional
Penerimaan barang dan jasa	IHK umum	Provinsi atau Kab/Kota terdekat
<i>Social Transfer in kind</i>	IHK umum	Provinsi atau Kab/Kota terdekat
Output BI		Neraca Jasa

2.4 Pembentukan Modal Tetap Bruto (PMTB)

i. Pendahuluan

Aktivitas investasi merupakan salah satu faktor penentu di dalam perkembangan atau pertumbuhan ekonomi suatu wilayah. Dalam konteks PDRB, aktivitas investasi yang dimaksud adalah investasi dalam bentuk fisik. Aktivitas investasi akan tercermin melalui komponen Pembentukan Modal Tetap Bruto (PMTB) dan Perubahan Inventori (PI). Komponen PMTB terkait dengan




keberadaan aset tetap (*fixed asset*) yang terlibat dalam proses produksi. Aset tetap dapat diklasifikasi menurut jenis barang modal, yakni dalam bentuk bangunan dan konstruksi lainnya; mesin dan perlengkapan; kendaraan; tumbuhan dan ternak; serta barang modal lainnya.

ii. Konsep dan definisi

PMTB didefinisikan sebagai penambahan dan pengurangan barang modal yang ada pada unit produksi dalam kurun waktu tertentu. Penambahan barang modal mencakup pengadaan, pembuatan, pembelian, sewa beli (*financial leasing*) barang modal baru dari dalam negeri, serta barang modal baru maupun barang modal bekas dari luar negeri (termasuk perbaikan besar, transfer dan barter), serta pertumbuhan aset sumberdaya hayati yang dibudidaya (*Cultivated Biological Resources/CBR*). Sedangkan pengurangan barang modal mencakup penjualan, transfer atau barter, serta sewa beli (*financial leasing*) barang modal bekas pada pihak lain. Dalam hal pengurangan barang modal yang disebabkan oleh bencana alam tidak dicatat sebagai pengurangan.

Barang modal mempunyai usia pakai lebih dari satu tahun, serta mengalami penyusutan sepanjang usia pakai-nya. Istilah "bruto" mengindikasikan bahwa di dalamnya mengandung unsur penyusutan. Penyusutan atau konsumsi barang modal (*Consumption of Fixed Capital*) menggambarkan penurunan nilai barang modal



karena digunakan dalam proses produksi secara normal selama periode tertentu.

iii. Cakupan

PMTB terdiri dari:

1. Penambahan dikurangi pengurangan barang modal baik baru maupun bekas, seperti bangunan tempat tinggal, bangunan bukan tempat tinggal, bangunan dan konstruksi lainnya, mesin dan perlengkapan, alat transportasi, tumbuhan dan hewan yang dibudidaya (*cultivated asset*), produk kekayaan intelektual (*intellectual property products*);
2. Biaya alih kepemilikan atas aset non-finansial yang tidak diproduksi seperti lahan dan aset yang dipatenkan;
3. Perbaikan besar barang modal, yang bertujuan untuk meningkatkan kapasitas produksi dan usia pakai-nya seperti *overhaul* mesin produksi, reklamasi pantai, pembukaan, pengeringan dan pengairan hutan, serta pencegahan banjir dan erosi.

iv. Sumber Data

- a. Output industri konstruksi, BPS
- b. Nilai impor 2 digit HS, BPS
- c. Indeks Produksi Industri Besar Sedang, BPS
- d. Laporan Keuangan Perusahaan, Data Sekunder dari luar BPS

- 
- e. Publikasi Statistik Industri Besar dan Sedang, BPS
 - f. Indeks Harga Perdagangan Besar (IHPB), BPS
 - g. Publikasi Statistik Pertambangan dan Penggalian (migas dan non-migas), BPS
 - h. Publikasi Statistik Listrik, Gas dan Air Minum, BPS
 - i. Publikasi Statistik Konstruksi, BPS
 - j. Data Eksplorasi Mineral, Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral
 - k. Statistik Peternakan, Ditjen Peternakan Kementerian Pertanian.

v. Metoda Estimasi

Komponen PMTB diestimasi dengan menggunakan metoda langsung ataupun metoda tidak langsung tergantung ketersediaan data di masing-masing daerah.

✓ Metoda Langsung:

PMTB atas dasar harga berlaku (Domestik) = Barang Modal Domestik + TTM + Pajak atas Produk (PPN) + Biaya Instalasi

PMTB atas dasar harga berlaku (Impor) = Barang Modal Impor + TTM + Bea Impor + Biaya Instalasi

PMTB atas dasar harga konstan diperoleh dengan cara *deflate* PMTB atas dasar harga berlaku dengan IHPB sebagai berikut:

$$PMTB_{ADHK} = \frac{PMTB_{ADHB}}{IHPB}$$

IHPB yang digunakan adalah IHPB Nasional (2010=100) sesuai jenis barang modal.

- ✓ Metoda Tidak Langsung:

Pendekatan Supply:

PMTB atas dasar harga berlaku = Total Supply Barang x Rasio
PMTB


Pendekatan Ekstrapolasi:

PMTB atas dasar harga konstan (t) = PMTB atas dasar harga
($t-1$) x Indeks Produksi (t)

2.5 Perubahan Inventori

i. Pendahuluan

Dalam suatu perekonomian, inventori atau persediaan merupakan salah satu komponen penting yang dibutuhkan untuk kelangsungan suatu proses produksi, di samping tenaga kerja dan barang modal. Komponen tersebut menjadi bagian dari pembentukan modal bruto atau investasi fisik, yang terjadi di suatu wilayah pada kurun waktu tertentu. Komponen inventori menggambarkan bagian dari investasi yang direalisasikan dalam bentuk barang jadi, barang setengah jadi, serta bahan baku dan




bahan penolong. Ketersediaan data tentang perubahan inventori pada suatu periode akuntansi menjadi penting guna memenuhi kebutuhan analisis tentang aktivitas investasi.

ii. Konsep dan Definisi

Pengertian sederhana dari inventori adalah barang yang dikuasai oleh produsen untuk tujuan diolah lebih lanjut (*intermediate consumption*) menjadi barang lainnya, yang mempunyai nilai ekonomi atau manfaat yang lebih tinggi. Termasuk dalam pengertian tersebut adalah barang yang masih dalam proses pengerjaan (*work in progress*), serta barang jadi yang belum dipasarkan dan masih dikuasai oleh produsen.

Nilai perubahan inventori merupakan selisih antara nilai inventori di akhir periode dengan nilai inventori pada awal periode (akuntansi). Perubahan inventori menjelaskan perubahan posisi barang inventori, yang dapat bermakna penambahan (bertanda positif) ataupun pengurangan (bertanda negatif).

Bagi produsen, keberadaan inventori diperlukan untuk menjaga kelangsungan dari proses produksi sehingga perlu dicadangkan, baik dalam bentuk bahan baku ataupun bahan penolong. Faktor ketidakpastian yang disebabkan oleh pengaruh dari faktor eksternal juga menjadi pertimbangan bagi pengusaha untuk melakukan pencadangan (khususnya bahan baku). Bagi pedagang,




pengadaan inventori lebih disebabkan oleh unsur spekulasi, dengan harapan agar mendapatkan keuntungan yang lebih besar.

Sedangkan bagi pemerintah, pencadangan komoditas yang strategis dimaksudkan untuk menjaga stabilitas ekonomi, sosial dan politik. Karena menyangkut kepentingan masyarakat luas, maka beberapa komoditas bahan pokok seperti beras, tepung terigu, minyak goreng dan gula pasir perlu dicadangkan oleh pemerintah. Namun bagi rumah tangga, pengadaan inventori barang lebih ditujukan untuk kemudahan dalam mengatur perilaku konsumsi.

iii. Cakupan

Inventori dapat diklasifikasikan menurut jenis barang sebagai berikut:


- a. Inventori menurut industri, seperti produk atau hasil perkebunan, kehutanan, perikanan, pertambangan, industri pengolahan, gas kota, air bersih, serta konstruksi;
- b. Inventori menurut jenis bahan baku & penolong (*material & supplies*), mencakup semua bahan, komponen atau persediaan untuk diproses lebih lanjut menjadi barang jadi;
- c. Barang jadi, mencakup barang yang telah diproses tetapi belum terjual atau belum digunakan termasuk barang yang dijual dalam bentuk yang sama seperti pada waktu

- 
- dibeli;
- d. Barang setengah jadi, yang mencakup barang yang sebagian telah diolah atau belum selesai (tidak termasuk konstruksi yang belum selesai);
 - e. Barang dagangan yang masih dikuasai oleh pedagang untuk tujuan dijual;
 - f. Ternak untuk tujuan dipotong;
 - g. Pengadaan barang oleh pedagang untuk tujuan dijual atau digunakan sebagai bahan bakar atau persediaan; serta
 - h. Persediaan pemerintah, yang mencakup barang strategis seperti beras, kedelai, gula pasir, dan gandum.

iv. Sumber Data

Sumber data yang digunakan untuk mengestimasi komponen perubahan inventori adalah:

1. Laporan keuangan perusahaan hasil kegiatan survei atau *website* Bursa Efek Indonesia (www.idx.co.id);
2. Laporan Keuangan Perusahaan BUMN/BUMD, Data Sekunder dari luar BPS
3. Data komoditas pertambangan, Statistik Pertambangan dan Pengalihan, BPS;
4. Data Inventori Publikasi Tahunan Industri Besar Sedang, BPS;
5. Data komoditas perkebunan;
6. Indeks harga implisit PDRB industri terpilih;
7. Indeks harga perdagangan besar (IHPB) terpilih;

- 
8. Data persediaan beras, Bulog; data semen, Asosiasi Semen Indonesia; data gula, Dewan Gula Indonesia; dan data ternak, Ditjennek Kementan.

v. Metode Estimasi

Komponen Perubahan Inventori (PI) diestimasi dengan menggunakan metoda revaluasi atau metoda deflasi, tergantung jenis komoditasnya.

a. Metoda Revaluasi

Metoda ini digunakan untuk komoditas pertanian, perkebunan, peternakan, kehutanan dan pertambangan.

PI atas dasar harga berlaku =

$(\text{Volume inventori } (t) - \text{Volume inventori } (t-1)) \times \text{Harga per unit}$

PI atas dasar harga konstan =

$\text{PI atas dasar harga berlaku} / \text{IHPB}$

b. Metoda Deflasi

Metoda ini digunakan untuk komoditas industri pengolahan dan komoditas lainnya.

PI atas dasar harga konstan =

$\text{Inventori } (t) \text{ atas dasar harga berlaku} / \text{IHPB } (t) -$

$\text{Inventori } (t-1) \text{ atas dasar harga berlaku} / \text{IHPB } (t-1)$

PI atas dasar harga berlaku =

PI atas dasar harga konstan x IHPB rata-rata (t)

2.6. Ekspor Impor


i. Pendahuluan

Aktivitas ekspor-impor dari dan ke suatu wilayah diyakini telah terjadi sejak lama, bahkan sebelum wilayah itu ditetapkan sebagai wilayah pemerintahan. Ragam barang dan jasa yang diproduksi maupun disparitas harganya menjadi faktor utama munculnya aktivitas tersebut. Wilayah yang tidak dapat memenuhi kebutuhannya sendiri berusaha untuk mendatangkan dari luar wilayah atau bahkan dari luar negeri. Di sisi lain, wilayah yang memproduksi barang dan jasa melebihi kebutuhan domestiknya, terdorong untuk memperluas pasar ke luar wilayah atau bahkan ke luar negeri.

Seiring perkembangan zaman, aktivitas produksi dan permintaan masyarakat atas berbagai barang dan jasa semakin meningkat. Kemajuan di bidang transportasi dan komunikasi juga turut memperlancar arus dan distribusi barang dan jasa. Kondisi ini semakin mendorong aktivitas ekspor-impor dari dan ke suatu wilayah.

ii. Konsep dan Definisi

Ekspor-impor didefinisikan sebagai alih kepemilikan ekonomi (melalui aktivitas penjualan/ pembelian, barter, pemberian atau



hibah) barang dan jasa antar residen wilayah tersebut dengan non-residen (yang berada di luar wilayah atau luar negeri).

iii. Cakupan

Ekspor-Impor ke dan dari suatu wilayah kabupaten/kota terdiri dari:

- a. Ekspor ke luar provinsi/kabupaten/kota
- b. Impor dari luar provinsi/kabupaten/kota.

Selisih antara ekspor dan impor didefinisikan sebagai Net Ekspor.

iv. Sumber Data


Nilai ekspor-impor wilayah kabupaten/kota didasarkan pada penghitungan Net Ekspor. Namun sering kali untuk mengestimasi tidak ada data yang sesuai dengan konsep dan definisi yang ditentukan. Kondisi inilah yang menyebabkan Net Ekspor kabupaten/kota diperlakukan sebagai item penyeimbang (*residual*), yakni perbedaan antara PDRB menurut pengeluaran dengan PDRB menurut lapangan usaha. Selanjutnya dilakukan pemisahan Net Ekspor menjadi ekspor dan impor dengan menggunakan metoda tidak langsung.



Bab 3

Tinjauan Perekonomian Kabupaten Badung


<https://badungkabupps.go.id>



Selama sepuluh tahun terakhir banyak perubahan yang terjadi pada perekonomian baik itu global, nasional maupun regional yang berpengaruh pada perekonomian lokal khususnya Kabupaten Badung. Di tengah perekonomian terbuka seperti sekarang ini, perekonomian Kabupaten Badung selain dipengaruhi oleh faktor di dalam Kabupaten Badung sendiri, juga dipengaruhi oleh perkembangan perekonomian antar kabupaten di Bali, perekonomian nasional bahkan dunia. Kabupaten Badung sebagai salah satu kabupaten yang sangat menggantungkan perekonomiannya dari sektor pariwisata, tentu sangat dipengaruhi oleh perekonomian dunia.

Pandemi covid 19 yang terjadi di seluruh dunia juga berdampak pada perekonomian Bali. Pandemi yang terjadi sejak awal tahun 2020 menyebabkan pariwisata Bali terdampak parah. Akses kunjungan ke Bali yang sempat dibatasi hingga ditutup sangat berdampak pada lumpuhnya pariwisata Bali. Penutupan bandara dan pelabuhan menyebabkan proses ekspor impor menjadi terhambat. Hal ini menyebabkan perekonomian Bali terganggu, sehingga pertumbuhan ekonomi Bali merosot. Akan tetapi, mulai tahun 2022 hingga tahun 2023 kondisi perekonomian di Bali mulai membaik menuju kondisi sebelum saat pandemi.

Data yang ada menunjukkan bahwa setiap pengeluaran mempunyai perilaku yang berbeda sesuai dengan tujuannya. Sebagian besar produk atau barang dan jasa yang tersedia di wilayah



domestik Badung digunakan untuk memenuhi permintaan konsumsi akhir (Rumah tangga, LNPRT, dan pemerintah). Sebagian lagi digunakan untuk investasi fisik (dalam bentuk PMTB dan perubahan inventori). Untuk lebih jelasnya, perilaku masing-masing pengeluaran itu akan diuraikan pada bagian berikut.

3.1. Tinjauan Agregat PDRB Kabupaten Badung Menurut Pengeluaran

Perekonomian Kabupaten Badung pada tahun 2023 menunjukkan keadaan semakin membaik menuju kondisi seperti sebelum masa pandemi. Pandemi covid 19 yang lalu melumpuhkan pariwisata Bali dimana pariwisata merupakan mata pencaharian yang dominan dari penduduk Bali khususnya di wilayah Kabupaten Badung. Penurunan ekonomi tersebut digambarkan melalui Nilai PDRB ADHB dan ADHK, serta pertumbuhan pada total PDRB.

Nilai PDRB ADHB Kabupaten Badung mengalami penurunan drastis pada periode tahun 2020 dan 2021. Kemudian pada tahun 2022 mengalami peningkatan hingga pada tahun 2023. Pada tahun 2019 PDRB ADHB Kabupaten Badung sebesar Rp. 62.836,11 miliar. Ketika pandemi melanda, PDRB ADHB mengalami penurunan hingga menjadi Rp. 44.882,08 miliar pada tahun 2021. Kemudian pada tahun 2022 PDRB ADHB kembali meningkat bahkan pada tahun 2023 sudah melebihi PDRB ADHB kondisi sebelum pandemi tahun 2019 menjadi Rp. 68.397,56 miliar.

Selain dinilai atas dasar harga Berlaku, PDRB menurut pengeluaran juga dinilai atas dasar harga konstan 2010. PDRB ADHK ini dimaksudkan bahwa berbagai produk yang dihitung tersebut dinilai dengan harga pada tahun 2010. Berdasarkan penghitungan PDRB ADHK, akan dapat dilihat gambaran tentang perubahan PDRB secara volume atau kuantitasnya saja tanpa ada pengaruh harga. PDRB ADHK menggambarkan perubahan atau pertumbuhan ekonomi secara riil, utamanya berkaitan dengan peningkatan volume konsumsi akhir.

TABEL 1.
PDRB Atas Dasar Harga Berlaku
Menurut Pengeluaran Kabupaten Badung, 2019-2023
(Miliar Rp)

Komponen Pengeluaran	2019	2020	2021	2022*	2023**
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1. Konsumsi Rumah Tangga	24.356,43	24.368,64	24.636,90	27.451,96	30.157,92
2. Konsumsi LNPRT	327,84	321,11	329,61	378,31	448,84
3. Konsumsi Pemerintah	4.364,59	4.361,34	4.126,12	4.255,66	4.800,63
4. PMTB	22.461,08	19.929,40	18.938,83	20.642,00	22.116,28
5. Perubahan Inventori	185,77	143,68	159,01	167,78	57,30
6. Net Ekspor	11.140,40	-98,15	-3.308,39	2.394,29	10.816,59
Total PDRB	62.836,11	49.026,03	44.882,08	55.290,00	68.397,56

Keterangan:

*) Angka Sementara

**) Angka Sangat Sementara

Selama kurun waktu 2019-2023, gambaran tentang perkembangan ekonomi Kabupaten Badung berdasarkan PDRB ADHK dapat dilihat pada tabel 2. Sama halnya dengan PDRB ADHB, seluruh

komponen pengeluaran akhir PDRB ADHK juga menunjukkan penurunan pada tahun 2020 dan 2021, kemudian meningkat kembali pada tahun 2022 hingga tahun 2023. Pada tahun 2019, PDRB ADHK Kabupaten Badung mencapai Rp. 37.326,47 miliar dan mengalami penurunan hingga menjadi Rp. 29.049,52 miliar pada tahun 2021. Setelah itu, pada tahun 2022 PDRB ADHK kembali meningkat dan pada tahun 2023 menjadi Rp. 35.554,32 miliar. Hal ini menunjukkan secara riil PDRB Kabupaten Badung tahun 2023 belum dapat melampaui kondisi sebelum pandemi pada tahun 2019.

TABEL 2.
PDRB Atas Dasar Harga Konstan 2010
Menurut Pengeluaran Kabupaten Badung, 2019-2023
(Miliar Rp)

Komponen Pengeluaran	2019	2020	2021	2022*	2023**
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1. Konsumsi Rumah Tangga	16.414,86	15.705,04	15.735,72	16.410,67	17.426,00
2. Konsumsi LNPRT	195,20	190,11	192,83	215,13	245,87
3. Konsumsi Pemerintah	2.625,48	2.554,68	2.451,10	2.465,31	2.686,84
4. PMTB	15.403,78	13.412,62	12.342,13	12.659,14	13.131,94
5. Perubahan Inventori	67,36	60,62	76,75	78,75	26,37
6. Net Ekspor	2.619,77	-775,25	-1.749,00	117,05	2.037,29
Total PDRB	37.326,47	31.147,82	29.049,52	31.946,05	35.554,32

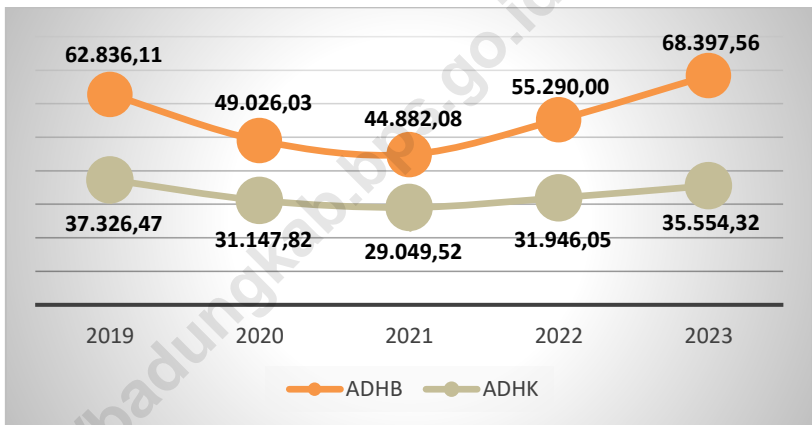
Keterangan:

*) Angka Sementara

***) Angka Sangat Sementara



Berdasarkan Gambar 1. terlihat bahwa pada umumnya nilai PDRB atas dasar harga berlaku, selalu lebih besar dari nilai PDRB atas dasar harga konstan. Perbedaan tersebut disebabkan karena ada pengaruh perubahan harga dalam perhitungan PDRB atas dasar harga berlaku. Dalam PDRB atas dasar harga konstan pengaruh faktor harga telah ditiadakan.



GAMBAR 1.

Perbandingan PDRB ADHB dan ADHK 2010 Menurut Pengeluaran Kabupaten Badung, 2019-2023 (Miliar)

Terbentuknya keseluruhan PDRB atau total PDRB merupakan kontribusi dari semua komponen pengeluarannya, yang terdiri dari konsumsi akhir rumah tangga (PK-RT), konsumsi akhir LNPRT (PK-LNPRT), konsumsi akhir pemerintah (PK-P), pembentukan modal tetap bruto (PMTB), perubahan inventori (PI), ekspor neto (NE) atau ekspor dikurangi impor. Secara umum, komposisi penggunaan produk yang dihasilkan di Kabupaten Badung sedikit berbeda dengan

kabupaten/kota yang ada di Bali. Sebagian besar produk yang dihasilkan, digunakan untuk memenuhi konsumsi rumah tangga dan Pembentukan Modal Tetap Bruto.

TABEL 3.

Distribusi PDRB Atas Dasar Harga Berlaku
Menurut Pengeluaran Kabupaten Badung, 2019-2023 (Persen)


Komponen Pengeluaran	2019	2020	2021	2022*	2023**
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1. Konsumsi Rumah Tangga	38,76	49,71	54,89	49,65	44,09
2. Konsumsi LNPRT	0,52	0,65	0,73	0,68	0,66
3. Konsumsi Pemerintah	6,95	8,90	9,19	7,70	7,02
4. PMTB	35,75	40,65	42,20	37,33	32,33
5. Perubahan Inventori	0,30	0,29	0,35	0,30	0,08
6. Net Ekspor	17,73	-0,20	-7,37	4,33	15,81
Total PDRB	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

Keterangan:

*) Angka Sementara

***) Angka Sangat Sementara

Pengeluaran untuk Konsumsi Rumah Tangga pada tahun 2023 mencapai 44,09 persen. Cenderung memiliki kontribusi yang menurun jika dibandingkan dengan tiga tahun sebelumnya. Pengeluaran terhadap konsumsi rumah tangga secara rata-rata selama lima tahun menyumbang sebesar 47,42 persen dari total PDRB atas dasar harga berlaku. Disisi lain, Pembentukan Modal Tetap Bruto di Kabupaten Badung juga memberikan kontribusi yang cukup besar dari keseluruhan pengeluaran jika dibandingkan dengan kabupaten/kota yang ada di Bali. Pada tahun 2019 peranan pengeluaran PMTB mencapai 35,75 persen. Kemudian tahun 2020



dan 2021 mengalami peningkatan hingga mencapai 40,65 persen pada tahun 2020 dan tahun 2021 mencapai 42,20 persen. Akan tetapi, pada tahun 2022 peran pengeluaran PMTB mengalami penurunan menjadi 37,33 persen dan kembali menurun menjadi 32,33 persen pada tahun 2023.

Selain pengeluaran konsumsi rumah tangga dan PMTB, komponen pengeluaran yang memberikan kontribusi cukup besar adalah ekspor impor. Sebagai destinasi pariwisata terbesar di Bali, Kabupaten Badung mampu melakukan ekspor terutama ekspor jasa kepada para wisatawan, baik mancanegara maupun wisatawan domestik luar Badung. Pada tahun 2019 atau masa sebelum pandemi, kondisi net ekspor Kabupaten Badung mengalami surplus yaitu nilai ekspor lebih besar dibandingkan impor. Hal ini tentunya merupakan kondisi yang baik dimana kemampuan ekspor Kabupaten Badung lebih besar dari impor. Berbeda dengan kondisi tahun 2020 dan 2021, net ekspor Kabupaten Badung bernilai negatif yang artinya nilai impor lebih tinggi daripada nilai ekspor. Hal ini juga disebabkan oleh pandemi covid-19 dimana kemampuan ekspor jasa maupun barang kepada para wisatawan berkurang secara drastis. Terjadinya penutupan bandara untuk penerbangan domestik maupun internasional menyebabkan pengiriman barang keluar daerah maupun keluar negeri terhambat sehingga mengalami penurunan nilai ekspor. Setelah kondisi pandemi covid-19 mereda dengan dibukanya kembali bandara untuk berbagai penerbangan,

menyebabkan pengiriman barang keluar masuk ke Kabupaten Badung kembali mengalami peningkatan. Maka dari itu, nilai net ekspor Kabupaten Badung pada tahun 2022 bernilai positif sebesar 4,33 persen dan kontribusinya meningkat menjadi 15,81 persen pada tahun 2023.

Di sisi lainnya, pengeluaran untuk konsumsi pemerintah ternyata memberikan kontribusi yang tidak terlalu besar. Namun, dari tabel 3 di atas menunjukkan bahwa kontribusi pengeluaran pemerintah mengalami kenaikan pada masa pandemi yaitu dari 6,95 persen pada tahun 2019 menjadi 9,19 persen di tahun 2021 yang kemudian mengalami penurunan menjadi 7,02 persen pada tahun 2023. Dua pengeluaran lainnya yaitu konsumsi LNPRT dan perubahan inventori hanya memberikan kontribusi sebesar 0,66 persen dan 0,08 persen pada tahun 2023.

TABEL 4.

Pertumbuhan PDRB ADHK 2010

Menurut Pengeluaran Kabupaten Badung, 2019-2023 (Persen)

Komponen Pengeluaran	2019	2020	2021	2022*	2023**
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1. Konsumsi Rumah Tangga	5,44	-4,32	0,20	4,29	6,19
2. Konsumsi LNPRT	10,89	-2,61	1,43	11,56	14,29
3. Konsumsi Pemerintah	2,87	-2,70	-4,05	0,58	8,99
4. PMTB	4,11	-12,93	-7,98	2,57	3,73
5. Perubahan Inventori	-	-	-	-	-
6. Net Ekspor	-	-	-	-	-

PDRB	5,81	-16,55	-6,74	9,97	11,29
-------------	------	--------	-------	------	-------

Keterangan:

*) Angka Sementara

***) Angka Sangat Sementara

Selain besaran distribusi dan besaran nominal, agregat makro lain yang dapat diturunkan dari data PDRB adalah pertumbuhan riil PDRB atau lebih dikenal dengan pertumbuhan ekonomi (*economic growth*). Pertumbuhan ekonomi menggambarkan kinerja pembangunan di bidang ekonomi di wilayah tersebut dibandingkan tahun sebelumnya. Pertumbuhan ekonomi Kabupaten Badung sebesar 5,81 persen pada tahun 2019. Sedangkan pada tahun 2020 ekonomi mengalami kontraksi menjadi -16,55 persen sekaligus menjadi pertumbuhan ekonomi terendah dalam waktu lima tahun terakhir dan tahun 2021 kembali mengalami kontraksi sebesar -6,74 persen. Setelah dua tahun mengalami kontraksi, pada tahun 2022 Kabupaten Badung mengalami pertumbuhan positif sebesar 9,97 persen dan kembali tumbuh hingga 11,29 persen pada tahun 2023 sekaligus menjadi pertumbuhan ekonomi tertinggi selama lima tahun terakhir. Secara umum pertumbuhan ekonomi Kabupaten Badung selalu lebih tinggi dari pertumbuhan ekonomi Provinsi Bali. Oleh sebab itu Kabupaten Badung termasuk salah satu pendorong peningkatan pertumbuhan ekonomi Bali. Namun, kondisi berbeda terjadi pada tahun 2020 dan 2021. Oleh karena kondisi pariwisata Kabupaten Badung terganggu oleh pandemi covid-19 menyebabkan ekonomi Kabupaten Badung

yang selama ini ditopang oleh faktor eksternal menjadi terkontraksi dalam sehingga mendorong kontraksi ekonomi Provinsi Bali.

TABEL 5.
Indeks Implisit PDRB Menurut Pengeluaran
Kabupaten Badung, 2019-2023

Komponen Pengeluaran	2019	2020	2021	2022*	2023**
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1. Konsumsi Rumah Tangga	148,38	155,16	156,57	167,28	173,06
2. Konsumsi LNPRT	167,94	168,91	170,93	175,85	182,55
3. Konsumsi Pemerintah	166,24	170,72	168,34	172,62	178,67
4. PMTB	145,82	148,59	153,45	163,06	168,42
5. Perubahan Inventori	275,77	237,02	207,19	213,06	217,28
6. Ekspor	140,35	138,79	125,86	179,51	196,20
7. Impor	121,58	126,74	139,36	170,46	178,78
Total PDRB	168,34	157,40	154,50	173,07	192,37


Keterangan:

*) Angka Sementara

***) Angka Sangat Sementara

Sementara itu, indeks implisit⁶ PDRB yang menggambarkan tingkat perubahan harga yang terjadi pada sisi konsumen, baik konsumen akhir (rumah tangga, LNPRT, dan pemerintahan) maupun konsumen lainnya (perusahaan dan luar negeri). Pada tahun 2019, indeks implisit bernilai 168,34. Kemudian mengalami penurunan pada masa pandemi covid-19 tahun 2020 dan tahun 2021 menjadi 157,40 dan 154,50. Setelah itu mengalami kenaikan pada tahun 2022

⁶ Indeks perkembangan




menjadi 173,07 dan meningkat cukup tinggi menjadi 192,37 pada tahun 2023.

3.2. Perkembangan Konsumsi Akhir Rumah Tangga

Konsumsi akhir rumah tangga adalah salah satu mesin utama bagi pertumbuhan ekonomi Kabupaten Badung. Konsumsi akhir rumah tangga menempati porsi yang hampir berimbang dengan PMTB dalam PDRB menurut pengeluaran. Hal tersebut dapat dilihat dari peranan konsumsi akhir rumah tangga yang hampir sebesar setengah dari total PDRB setiap tahunnya, dimana konsumsi akhir rumah tangga memberikan kontribusi sekitar 39 persen sampai hampir 55 persen terhadap total PDRB.

Pada Tabel 6. di bawah terlihat bahwa dalam kurun waktu 2019-2023 konsumsi akhir rumah tangga mengalami peningkatan baik dalam nominal atas dasar harga berlaku maupun riil atas dasar harga konstan. Dengan jumlah penduduk yang cukup besar, nilai pengeluaran konsumsi akhir rumah tangga merupakan penyumbang yang cukup besar dalam pembentukan PDRB Kabupaten Badung. Hal ini tidak terlepas dari Kabupaten Badung merupakan daerah migran dimana peluang ekonomi dipandang masih cukup besar sehingga jumlah penduduk tiap tahun meningkat.

Perkembangan peranan konsumsi akhir rumah tangga di Kabupaten Badung meningkat pada periode tahun 2020-2021 kemudian mengalami penurunan pada periode tahun 2022-2023. Hal



ini dapat dilihat pada Tabel 6 yaitu proporsi penggunaan konsumsi akhir rumah tangga terhadap PDRB. Pada tahun 2019, peranan konsumsi akhir rumah tangga sebesar 38,76 persen. Kemudian pada tahun 2020 peranan konsumsi akhir rumah tangga mengalami peningkatan tinggi hingga mencapai 49,71 persen dan mencapai 54,89 persen pada tahun 2021. Akan tetapi pada tahun 2022 konsumsi akhir rumah tangga mengalami penurunan menjadi 49,65 persen dan kembali menurun menjadi 44,09 persen pada tahun 2023.

Di sisi lain, tahun 2019 rata-rata konsumsi per-kapita menunjukkan kecenderungan yang searah dengan kenaikan jumlah penduduk, dan selalu diikuti pula oleh kenaikan nilai konsumsinya. Selain karena jumlah penduduk, pendapatan penduduk yang meningkat yang tergambar secara tidak langsung melalui PDRB perkapita, menyebabkan pengeluaran atas konsumsi juga meningkat. Berbeda dengan kondisi tahun 2020, ekonomi Kabupaten Badung yang selama ini ditopang oleh sektor pariwisata, karena adanya pandemi covid-19 perekonomian Kabupaten Badung menjadi menurun. Adanya pandemi juga menyebabkan jumlah penduduk Kabupaten Badung berkurang. Menurunnya jumlah penduduk mengakibatkan rata-rata konsumsi per kapita masyarakat meningkat.

TABEL 6.

**Perkembangan Penggunaan Konsumsi Akhir Rumah Tangga
Kabupaten Badung, 2019-2023**

Uraian	2019	2020	2021	2022*	2023**
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
Total Konsumsi Rumah Tangga					
a. ADHB (Miliar Rp)	24.356,43	24.368,64	24636,90	27.451,96	30.157,92
b. ADHK 2010 (Miliar Rp)	16.414,86	15.705,04	15.735,72	16.410,67	17.426,00
Proporsi terhadap PDRB (% ADHB)	38,76	49,71	54,89	49,65	44,09
Rata-rata konsumsi per-kapita/tahun (Ribu Rp)					
a. ADHB	35.878,43	44.392,98	44.571,51	49.191,78	53.535,09
b. ADHK 2010	24.180,03	28.610,29	28.468,06	29.406,65	30.933,92
Pertumbuhan⁷					
a. Total konsumsi	5,44	-4,32	0,20	4,29	6,19
b. Perkapita	2,03	18,32	-0,50	3,30	5,19
Jumlah penduduk (000 org)	678,86	548,93	552,75	558,06	563,33


Keterangan:

*) Angka Sementara

**) Angka Sangat Sementara

Tabel 6 di atas menunjukkan pertumbuhan rata-rata konsumsi per-kapita cenderung berfluktuasi. Pertumbuhan yang bernilai positif, menunjukkan bahwa rata-rata konsumsi setiap penduduk di Kabupaten Badung mengalami peningkatan, baik secara kuantitas (*volume*) maupun secara nilai (termasuk juga peningkatan kualitas). Peningkatan rata-rata konsumsi per-kapita secara “riil”

⁷ Diturunkan dari perhitungan PDRB (atas dasar harga konstan/ADHK 2010)



bernilai 2,03 persen pada tahun 2019 kemudian meningkat tajam menjadi 18,32 persen pada tahun 2020 dan mengalami kontraksi pada tahun 2021 menjadi -0,50 persen yang artinya ada penurunan rata-rata konsumsi per-kapita. Selanjutnya pada tahun 2022 kembali terjadi peningkatan rata-rata konsumsi sebesar 3,30 persen dan menjadi 5,19 persen pada tahun 2023. Sejalan dengan pertumbuhan konsumsi akhir rumah tangga perkapita, laju pertumbuhan total konsumsi akhir rumah tangga mengalami fluktuasi yang agak berbeda. Pertumbuhan total konsumsi bernilai 5,44 persen pada tahun 2019. Sedangkan pada tahun 2020 terjadi penurunan total konsumsi sebesar -4,32 persen dan kembali meningkat mulai tahun 2021 hingga tahun 2023 masing-masing senilai 0,20 persen; 4,29 persen; dan 6,19 persen.

Jika melihat struktur komponen konsumsi akhir rumah tangga di Kabupaten Badung, dapat diketahui bahwa selama lima tahun terakhir tidak terjadi perubahan struktur pembentuk komponen konsumsi akhir rumah tangga. Proporsi terbesar konsumsi rumah tangga di Kabupaten Badung didominasi oleh pengeluaran konsumsi makanan, minuman, dan rokok yaitu sebesar 17,87 persen pada tahun 2023. Selama lima tahun terakhir rata-rata proporsi konsumsi makanan, minuman dan rokok mencapai 19,05 persen. Hal ini menunjukkan bahwa pola konsumsi akhir rumah tangga di Kabupaten Badung tidak jauh berbeda dengan kabupaten/kota lain yang didominasi dengan pengeluaran pemenuhan kebutuhan pokok

sehari-hari berupa makanan, minuman, dan rokok. Selanjutnya komponen konsumsi akhir rumah tangga di Kabupaten Badung juga didominasi oleh konsumsi Transportasi, Komunikasi, Rekreasi, dan Budaya; konsumsi Perumahan, Perkakas, Perlengkapan dan Penyelenggaraan Rumah Tangga; dan konsumsi Hotel & Restoran dengan proporsi masing-masing 6,30 persen; 6,17 persen; dan 5,64 persen pada tahun 2023.

TABEL 7.
Struktur Komponen Konsumsi Akhir Rumah Tangga
Kabupaten Badung (Persen), 2019-2023

Kelompok Konsumsi	2019	2020	2021	2022*	2023**
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1. Makanan, Minuman, dan Rokok	14,43	19,94	22,43	20,59	17,87
2. Pakaian dan Alas Kaki	1,15	1,50	1,66	1,45	1,28
3. Perumahan, Perkakas, Perlengkapan dan Penyelenggaraan Rumah Tangga	5,42	7,20	7,93	7,04	6,17
4. Kesehatan & Pendidikan	2,96	4,11	4,58	3,99	3,56
5. Transportasi, Komunikasi, Rekreasi, dan Budaya	6,08	6,88	7,58	6,99	6,30
6. Hotel & Restoran	5,73	6,38	6,62	5,90	5,64
7. Lainnya	3,00	3,69	4,09	3,69	3,28
Total Konsumsi	38,76	49,71	54,89	49,65	44,09

*) Angka Sementara

**) Angka Sangat Sementara

Sementara itu, tingkat perubahan harga secara implisit menunjukkan fluktuasi setiap tahunnya pada masing-masing

kelompok pengeluaran konsumsi rumah tangga. Kelompok pengeluaran makanan, minuman, dan rokok memiliki rata-rata peningkatan harga tertinggi dibandingkan kelompok lainnya pada tahun 2023 yaitu sebesar 5,11 persen. Angka ini mengalami penurunan dibandingkan tahun 2022 yang sebesar 10,03 persen. Rincian peningkatan harga pada kelompok makanan, minuman, dan rokok masing-masing sebesar 2,85 persen (2019); 4,93 persen (2020); 1,84 persen (2021); 10,03 persen (2022); dan 5,11 persen (2023).

TABEL 8.

Pertumbuhan Implisit (Indeks Harga) Penggunaan Konsumsi Akhir Rumah Tangga Kabupaten Badung (Persen), 2019-2023

Kelompok Konsumsi	2019	2020	2021	2022*	2023**
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1. Makanan, Minuman, dan Rokok	2,85	4,93	1,84	10,03	5,11
2. Pakaian dan Alas Kaki	2,76	1,73	-1,41	-0,33	0,11
3. Perumahan, Perkakas, Perlengkapan dan Penyelenggaraan RT	1,15	1,71	0,35	5,71	2,55
4. Kesehatan & Pendidikan	5,17	4,33	0,25	2,54	2,66
5. Transportasi, Komunikasi, Rekreasi, dan Budaya	2,19	-0,47	-0,95	6,18	4,22
6. Hotel & Restoran	3,18	4,97	0,79	4,15	3,00
7. Lainnya	1,70	9,44	1,10	7,74	3,98
Total Konsumsi	2,66	4,57	0,90	6,84	3,46

*) Angka Sementara

**) Angka Sangat Sementara



3.3. Perkembangan Konsumsi Akhir LNPRT

Organisasi nirlaba merupakan suatu lembaga atau kumpulan dari beberapa individu yang memiliki tujuan tertentu dan bekerja sama untuk mencapai tujuan tertentu, yang dalam pelaksanaannya kegiatan mereka lakukan tidak berorientasi pada pemupukan laba atau kekayaan semata. Bentuk Lembaga NonProfit yang melayani rumah tangga misalnya Organisasi Kemasyarakatan, Organisasi Sosial, Organisasi Profesi, Perkumpulan sosial/kebudayaan/olahraga dan hobi, Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM), Lembaga Keagamaan, serta Organisasi Bantuan Kemanusiaan/Beasiswa. Di Indonesia, peranan lembaga nonprofit masih terbilang rendah, tidak seperti di luar negeri. Begitupula halnya dengan di Kabupaten Badung, dimana peranan LNPRT paling rendah diantara semua komponen PDRB pengeluaran. Selama lima tahun berturut-turut peranan LNPRT ini tidak lebih dari satu persen dari total PDRB Kabupaten Badung.

Seperti yang dikemukakan sebelumnya, peranan konsumsi LNPRT di Kabupaten Badung termasuk yang paling rendah jika dibandingkan dengan komponen lainnya. Proporsi konsumsi LNPRT ini dibandingkan total PDRB Kabupaten Badung hanya berkisar antara 0,52 persen sampai 0,73 persen selama periode tahun 2019 sampai 2023. Pada tahun 2019, total konsumsi LNPRT mengalami peningkatan baik atas dasar harga berlaku maupun atas dasar harga konstan. Namun pada tahun 2020 mengalami penurunan dan

kembali meningkat pada tahun 2021-2023. Kenaikan total konsumsi pada tahun 2022 dan tahun 2023 tidak disertai dengan kenaikan peranan konsumsi LNPRT terhadap PDRB Kabupaten Badung. Tahun 2020 pertumbuhan konsumsi LNPRT menurun menjadi -2,61 persen, kemudian meningkat menjadi 11,56 persen pada tahun 2022 dan menjadi sebesar 14,29 persen pada tahun 2023.

TABEL 9.
Perkembangan Penggunaan Konsumsi LNPRT
Kabupaten Badung, 2019-2023
(Miliar Rupiah)

U r a i a n	2019	2020	2021	2022*	2023**
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
Total Konsumsi LNPRT					
a. ADHB (<i>Miliar Rp</i>)	327,84	321,11	329,61	378,31	448,84
b. ADHK 2010 (<i>Miliar Rp</i>)	195,20	190,11	192,83	215,13	245,87
Proporsi terhadap PDRB (% ADHB)	0,52	0,65	0,73	0,68	0,66
Pertumbuhan	10,89	-2,61	1,43	11,56	14,29

Keterangan:

*) Angka Sementara

**) Angka Sangat Sementara

3.4. Perkembangan Konsumsi Akhir Pemerintah

Secara umum fungsi pemerintah dalam perekonomian modern dapat dibagi menjadi tiga, yaitu fungsi alokasi, fungsi distribusi dan fungsi stabilisasi. Fungsi alokasi merupakan fungsi pemerintah mengusahakan agar alokasi sumber-sumber ekonomi dilaksanakan

secara efisien, fungsi distribusi dimaksudkan pemerintah mengusahakan distribusi dan pemerataan bagi kelangsungan ekonomi masyarakat, sedangkan fungsi stabilisasi pemerintah mempunyai peran mengusahakan stabilisasi dalam perekonomian. Perekonomian yang sepenuhnya diserahkan kepada sektor swasta (*private*) sangat peka terhadap guncangan keadaan yang akan menimbulkan pengangguran dan inflasi.

TABEL 10.
Perkembangan Pengeluaran Konsumsi Akhir Pemerintah
Kabupaten Badung, 2019-2023


Uraian	2019	2020	2021	2022*	2023**
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
Total Konsumsi Pemerintah					
a. ADHB (<i>Miliar Rp</i>)	4.364,59	4.361,34	4.126,12	4.255,66	4.800,63
b. ADHK 2010 (<i>Miliar Rp</i>)	2.625,48	2.554,68	2.451,10	2.465,31	2.686,84
Proporsi terhadap PDRB	6,95	8,90	9,31	7,87	7,87
Konsumsi Pemerintah per-kapita (<i>Ribu Rp</i>)					
a. ADHB	6.429,30	7.945,18	7.464,72	7.625,81	8.521,89
b. ADHK 2010	3.867,49	4.653,92	4.434,37	4.417,64	4.769,57
Pertumbuhan⁸ (%)					
a. Total konsumsi Pemerintah	2,87	-2,70	-4,05	0,58	8,99
b. Konsumsi perkapita	-0,45	20,33	-4,72	-0,38	7,97
Jumlah penduduk (<i>000 org</i>)	678,86	548,93	552,75	558,06	563,33

Keterangan:

*) Angka Sementara

**) Angka Sangat Sementara


⁸ Diturunkan dari perhitungan PDRB (atas dasar harga konstan /ADHK 2000)



Konsumsi pemerintah dalam arti riil dapat dipakai sebagai indikator besarnya kegiatan pemerintah yang dibiayai oleh pengeluaran pemerintah. Semakin besar dan banyak kegiatan pemerintah, maka semakin besar pula pengeluaran pemerintah yang bersangkutan. Pada tahun 2019, total pengeluaran konsumsi akhir pemerintah atas dasar harga berlaku mencapai Rp. 4.364,59 miliar. Kemudian terjadi penurunan pengeluaran konsumsi akhir pemerintah hingga tahun 2021 menjadi Rp. 4.126,12 miliar dan kembali meningkat pada tahun 2022 menjadi Rp. 4.255,66 miliar dan menjadi Rp. 4.800,63 miliar pada tahun 2023. Sejalan dengan konsumsi pemerintah atas dasar harga berlaku, konsumsi pemerintah atas dasar harga konstan 2010, juga menunjukkan hal yang pada tahun 2019. Pada tahun 2020, konsumsi pemerintah atas dasar harga konstan menunjukkan penurunan sampai tahun 2021 menjadi Rp. 2.451,10 miliar. Kemudian kembali mengalami peningkatan menjadi Rp. 2.465,31 miliar pada tahun 2022 dan menjadi Rp. 2.686,84 miliar pada tahun 2023.

Peranan komponen pengeluaran pemerintah terhadap total PDRB juga mengalami tren yang berfluktuasi. Proporsi pengeluaran pemerintah terhadap PDRB paling besar terjadi pada tahun 2021 yaitu sebesar 9,31 persen. Proporsi paling rendah terjadi pada tahun 2019 yaitu hanya sebesar 6,95 persen.

Pemerintah yang salah satu fungsinya adalah pembangunan, memiliki keterlibatan baik langsung maupun tidak langsung dalam



bentuk-bentuk kegiatan ekonomi dan penyediaan prasarana bagi masyarakat. Pengeluaran yang dimaksud dapat dibedakan menjadi dua yaitu pengeluaran yang bersifat investasi yang berupa prasarana dasar dan sarana fisik, serta pengeluaran rutin yang diarahkan untuk menunjang kelancaran penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan meliputi belanja pegawai, barang, perjalanan dinas, pemeliharaan, belanja rutin dan lain-lain.

Perkembangan komponen pengeluaran pemerintah rata-rata per kapita tidak sejalan dengan perkembangan komponen pengeluaran total pemerintah. Konsumsi pemerintah perkapita atas dasar harga berlaku terendah terjadi pada tahun 2019, yaitu sebesar Rp. 6.429,30 ribu, dan yang tertinggi terjadi pada tahun 2023 yaitu sebesar Rp. 8.521,89 ribu.

Pertumbuhan konsumsi pemerintah selama periode lima tahun terakhir cenderung melambat tetapi mulai pulih pada tahun 2023. Tahun 2019 pertumbuhan konsumsi pemerintah sebesar 2,87 persen hingga mengalami kontraksi sebesar -2,70 persen pada tahun 2020 dan kembali mengalami kontraksi sebesar -4,05 persen pada tahun 2021 dan akhirnya bernilai positif kembali pada tahun 2022 yaitu sebesar 0,58 persen. Kemudian tumbuh melesat sebesar 8,99 pada tahun 2023.



3.5. Perkembangan Pembentukan Modal Tetap Bruto

Pembentukan Modal Tetap Bruto yang lebih dikenal dengan investasi merupakan komponen pengeluaran PDRB yang berhubungan erat dengan proses kegiatan ekonomi dalam rangka peningkatan produksi (output) di masa yang akan datang. Kegiatan investasi memungkinkan masyarakat secara terus menerus meningkatkan kegiatan ekonomi dan kesempatan kerja, meningkatkan pendapatan dan meningkatkan taraf kehidupan rakyat. Peranan ini bersumber dari beberapa fungsi penting dari kegiatan investasi, yaitu investasi merupakan salah satu komponen dari pengeluaran agregat, sehingga kenaikan investasi akan meningkatkan permintaan agregat dan kesempatan kerja. Pertambahan modal sebagai akibat investasi akan menambah kapasitas produksi.

Investasi sangat penting dalam pembangunan ekonomi yang berkelanjutan, terutama dalam jangka panjang. Hal ini disebabkan karena investasi yang dilakukan dapat meningkatkan kapasitas produksi menjadi lebih baik, baik dalam hal kuantitas maupun kualitas. Namun dalam perkembangannya diharapkan investasi yang dilakukan tetap memperhatikan keseimbangan alam dan lingkungan. Bagaimanapun, investasi yang disertai dengan perusakan lingkungan hanya akan menimbulkan masalah baru, bahkan mengurangi kesejahteraan penduduk yang bernaung di dalamnya.

Dampak pengganda yang diciptakan dari peningkatan investasi adalah meningkatnya pemanfaatan sumber daya secara optimal dalam kegiatan produksi, berkembangnya kegiatan perdagangan antar daerah, dan terciptanya nilai tambah yang lebih besar. Investasi juga mendorong percepatan perkembangan teknologi informasi, telekomunikasi, dan transportasi. Percepatan ini akan memberikan kesempatan yang lebih besar bagi mobilitas sumber daya (bahan mentah, barang modal, dan tenaga kerja) secara lebih mudah dan murah. Percepatan ini juga bermanfaat bagi peningkatan kualitas hidup masyarakat. Investasi dapat menjadi pendorong roda perekonomian daerah dan meningkatkan kesejahteraan ketika semua pihak mendapat manfaat maksimal dari aktivitas tersebut.

TABEL 11.
Perkembangan dan Struktur PMTB
Kabupaten Badung, 2019-2023

Uraian	2019	2020	2021	2022*	2023**
(1)	(3)	(4)	(5)	(6)	(6)
Total PMTB					
a. ADHB (Miliar Rp)	22.461,08	19.929,40	18.938,83	20.642,00	22.116,28
b. ADHK 2010 (Miliar Rp)	15.403,78	13.412,62	12.342,13	12.659,14	13.131,94
Proporsi terhadap PDRB (% - ADHB)	35,75	40,65	42,20	37,33	32,33
Pertumbuhan⁹ (%)	4,11	-12,93	-7,98	2,57	3,73

Keterangan:

⁹ Diturunkan dari perhitungan PDRB (atas dasar harga konstan/ADHK 2010)




*) Angka Sementara

**) Angka Sangat Sementara

Pada tahun 2019, pengeluaran PMTB Kabupaten Badung mengalami peningkatan, namun pada tahun 2020 mengalami penurunan hingga tahun 2021 kemudian mengalami peningkatan kembali pada tahun 2022 hingga tahun 2023. Pada tahun 2019 besaran PMTB atas dasar harga berlaku sebesar Rp. 22.461,08 miliar. Namun, pada tahun 2020 mengalami penurunan hingga tahun 2021 menjadi Rp. 18.938,83 miliar. Kemudian mengalami peningkatan mulai tahun 2022 hingga menjadi Rp. 22.116,28 miliar pada tahun 2023.

Besaran komponen PMTB Kabupaten Badung sebagian besar didukung oleh adanya perbaikan infrastruktur yang dilakukan baik oleh pemerintah maupun swasta. Secara proporsi, komponen PMTB memegang peranan yang cukup besar di Kabupaten Badung. Hal ini cukup berbeda dengan kabupaten lain yang ada di Provinsi Bali. Proporsi PMTB terhadap PDRB selama lima tahun terakhir mengalami fluktuasi. Pada tahun 2019 proporsi PMTB sebesar 35,75 persen. Setelah itu, proporsi PMTB mengalami peningkatan menjadi 42,20 persen pada tahun 2021 dan kembali mengalami penurunan hingga tahun 2023 menjadi 32,33 persen.

Pertumbuhan komponen PMTB Kabupaten Badung juga mengalami fluktuasi selama periode lima tahun terakhir. Di tahun 2019, pertumbuhan PMTB berhasil mencapai 4,11 persen. Sedangkan tahun 2020 pertumbuhan PMTB berkontraksi menjadi



-12,93 persen dan pada tahun 2021 kembali mengalami kontraksi sebesar -7,98 persen. Kemudian pada tahun 2022 PMTB mulai tumbuh positif kembali sebesar 2,57 persen dan meningkat menjadi 3,73 persen pada tahun 2023.

3.6. Perkembangan Perubahan Inventori

Perubahan inventori merupakan komponen dengan proporsi terendah dalam struktur PDRB Kabupaten Badung. Komponen ini hanya berkontribusi sekitar 0,08 sampai 0,35 persen selama lima tahun terakhir. Inventori merupakan persediaan barang (baik barang jadi maupun setengah jadi) pada unit institusi yang tidak terpakai pada proses produksi atau belum selesai diproses atau belum terjual, sedangkan perubahan inventori merupakan selisih antara nilai inventori pada akhir periode pencatatan dengan nilai inventori pada awal periode pencatatan. Perubahan inventori menjelaskan tentang perubahan posisi barang inventori yang bisa bermakna penambahan (tanda positif) atau pengurangan (bertanda negatif).

Apabila perubahan inventori bertanda positif berarti terjadi penambahan persediaan barang, sedangkan apabila bertanda negatif berarti terjadi pengurangan persediaan. Terjadinya penumpukan barang inventori mengindikasikan bahwa distribusi atau pemasaran tidak berjalan dengan sempurna.

Perkembangan perubahan inventori selama periode 2019-2023 mengalami fluktuasi. Pada tahun 2019 hingga tahun 2020, perubahan inventori cenderung mengalami penurunan hingga di

tahun 2020 menjadi Rp. 143,68 miliar. Setelah itu, perubahan inventori kembali meningkat menjadi Rp. 159,01 miliar pada tahun 2021 dan Rp. 167,78 miliar pada tahun 2022. Akan tetapi, pada tahun 2023 terjadi penurunan perubahan inventori cukup drastis menjadi Rp. 57,30 miliar.

TABEL 12.
Perkembangan dan Struktur Perubahan Inventori
Kabupaten Badung, 2019-2023

Uraian	2019	2020	2021	2022*	2023**
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
Total Nilai Inventori					
a. ADHB (Miliar Rp)	185,77	143,68	159,01	167,78	57,30
b. ADHK 2010 (Miliar Rp)	67,36	60,62	76,75	78,75	26,37
Proporsi terhadap PDRB (% - ADHB)	0,30	0,29	0,35	0,30	0,08

Keterangan:

*) Angka Sementara

***) Angka Sangat Sementara

Begitupula halnya dengan perubahan inventori atas dasar harga konstan. Pada tahun 2019 komponen ini bernilai sebesar Rp. 67,36 miliar. Kemudian mengalami penurunan hingga pada tahun 2020 menjadi Rp. 60,62 miliar. Pada tahun 2021 meningkat mencapai Rp. 76,75 miliar, dan tahun 2022 mencapai Rp. 78,75 miliar. Akan tetapi, penurunan drastis perubahan inventori terjadi pada tahun 2023 menjadi Rp. 26,37 miliar.



3.7. Perkembangan Net Ekspor Barang Dan Jasa Luar Negeri

Setiap wilayah memiliki sumber daya alam yang berbeda-beda satu sama lain. Suatu wilayah akan membutuhkan komoditi yang tidak tersedia di wilayahnya tetapi tersedia di wilayah lain, maka daerah tersebut akan melakukan perdagangan atau pertukaran komoditi dengan wilayah lainnya. Wilayah tersebut memberlakukan sistem perekonomian terbuka dimana antar wilayah melakukan kegiatan pertukaran baik barang maupun jasa. Demikian pula halnya dengan yang dilakukan di Kabupaten Badung, dimana Kabupaten Badung melakukan perdagangan baik ekspor ke luar wilayah Badung, dan juga mendatangkan barang dan jasa dari luar wilayah Badung (impor).

Idealnya ekspor yang dilakukan adalah merupakan barang jadi sehingga nilai tambah yang tercipta di Kabupaten Badung bisa menjadi lebih besar jika dibandingkan dengan mengekspor barang mentah atau setengah jadi. Sebaliknya idealnya impor yang dilakukan sebaiknya adalah barang modal, mesin-mesin dan lain sebagainya yang peruntukannya untuk menunjang kegiatan produksi yang ada di Kabupaten Badung.

Kabupaten Badung merupakan pusat destinasi para wisatawan mancanegara di Provinsi Bali. Banyaknya Objek dan Daya Tarik Wisata (ODTW) di Kabupaten Badung membuka peluang yang sangat besar untuk melakukan ekspor jasa kepada wisatawan baik

mancanegara maupun wisatawan domestik yang berasal dari luar Kabupaten Badung.

Disisi lain, sebagai wilayah yang mengembangkan sistem ekonomi terbuka dan untuk memenuhi kebutuhan konsumsi di wilayahnya, Kabupaten Badung tidak bisa terlepas dari adanya produk dari luar wilayah Badung. Produk dari luar wilayah Badung tersebut digunakan untuk memenuhi berbagai aktivitas pengeluaran, baik itu konsumsi rumah tangga, LNPRT, konsumsi pemerintah, PMTB termasuk inventori serta pengeluaran atas ekspor. Oleh karena itu, lalu lintas perdagangan ekspor maupun impor terjadi di Kabupaten Badung yang dalam hal ini dapat tercermin dalam net ekspor.


TABEL 13.
Perkembangan Net Ekspor Barang dan Jasa
Kabupaten Badung, 2019-2023

Uraian	2019	2020	2021	2022*	2023**
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
Total Nilai Net Ekspor					
a. ADHB (Miliar Rp)	11.140,40	-98,15	-3.308,39	2.394,29	10.816,58
b. ADHK 2000 (Miliar Rp)	2.619,77	-775,25	-1.749,00	117,05	2.037,29
Proporsi terhadap PDRB (% - ADHB)	17,73	-0,20	-7,37	4,33	15,81

Keterangan:


*) Angka Sementara

**) Angka Sangat Sementara



Kondisi yang tidak biasa dialami oleh seluruh dunia akibat pandemi covid-19 pada tahun 2020. Kabupaten Badung juga tidak lepas dari dampak pandemi tersebut. Pada tahun 2019 nilai net ekspor Kabupaten Badung bernilai positif dan mengalami peningkatan. Adanya peningkatan nilai net ekspor dari tahun ke tahun menggambarkan bahwa nilai ekspor yang dilakukan oleh Kabupaten Badung lebih tinggi dari impor yang dilakukan untuk memenuhi kebutuhan di wilayah Kabupaten Badung. Sedangkan pada tahun 2020 dan 2021, nilai net ekspor Kabupaten Badung bernilai negatif, dimana hal ini menggambarkan bahwa nilai ekspor yang dilakukan lebih kecil daripada nilai impor. Dalam hal ini, dampak pandemi covid-19 sangat terlihat. Penutupan bandara dan pelabuhan sebagai akses ekspor jasa dan barang kepada para wisatawan menyebabkan proses ekspor ke luar daerah maupun ke luar negeri terhambat sehingga nilai ekspor berkurang. Setelah pandemi covid-19 mereda, dengan dibukanya kembali bandara dan pelabuhan, nilai net ekspor Kabupaten Badung bernilai positif.

Pada tahun 2019, nilai net ekspor mencapai Rp. 11.140,40 miliar. Namun, pada tahun 2020 dan 2021 net ekspor Kabupaten Badung berkontraksi secara berturut-turut menjadi -98,15 miliar dan -3.308,39 miliar. Kemudian nilai net ekspor Kabupaten Badung pada tahun 2022 kembali bernilai positif sebesar Rp. 2.394,29 miliar dan mengalami peningkatan signifikan menjadi Rp. 10.816,58 miliar pada tahun 2023.



Sejalan dengan nilai net ekspor atas dasar harga berlaku, nilai net ekspor atas dasar harga konstan 2010 juga menunjukkan arah pertumbuhan yang sama, yaitu mengalami peningkatan pada tahun 2019. Nilai “riil” net ekspor tahun 2019 adalah sebesar Rp. 2.619,77 miliar. Sedangkan net ekspor atas dasar harga konstan tahun 2020 dan 2021 secara berturut-turut terkontraksi menjadi -775,25 miliar dan -1.749,00 miliar. Kemudian pada tahun 2022 nilai net ekspor Kabupaten Badung kembali bernilai positif menjadi Rp. 117,05 miliar dan meningkat tajam menjadi Rp. 2.037,29 miliar pada tahun 2023.


Nilai net ekspor Kabupaten Badung mengalami peningkatan pada tahun 2019, sejalan dengan proporsi terhadap PDRB yang cukup besar senilai 17,73 persen. Kemudian pada masa pandemi covid-19, Kabupaten Badung memiliki proporsi nilai net ekspor negatif yaitu sebesar -0,20 persen pada tahun 2020 dan -7,37 persen pada tahun 2021. Hal ini menunjukkan bahwa nilai impor cenderung lebih besar dibandingkan dengan ekspor yang terjadi di Kabupaten Badung. Kemudian pada tahun 2022 proporsi nilai net ekspor Kabupaten Badung kembali bernilai positif senilai 4,33 persen dan melonjak menjadi 15,81 persen pada tahun 2023.



Bab 4

Perkembangan Agregat PDRB
Kabupaten Badung
Menurut Pengeluaran

<https://badungkab.go.id>



Berbagai indikator ekonomi makro yang lazim digunakan dalam analisis sosial ekonomi dapat diturunkan dari seperangkat data PDRB. Berikut ini akan disajikan beberapa rasio (perbandingan relatif) guna melengkapi analisis, di tengah keterbatasan informasi yang tersedia.

4.1. PDRB (Nominal)

Agregat ini menjelaskan nilai produk barang dan jasa yang dihasilkan di dalam suatu wilayah ekonomi domestik, dimana di dalamnya masih terkandung nilai penyusutan. PDRB dapat digunakan sebagai ukuran “produktivitas”, karena menjelaskan kemampuan wilayah dalam menghasilkan produk domestik, yang dihitung melalui 3 (tiga) pendekatan, yaitu pendekatan nilai tambah, pengeluaran, dan pendapatan.

Dari series data PDRB pengeluaran dapat diturunkan beberapa ukuran yang berkaitan dengan PDRB maupun variabel pendukung lain (seperti rumah tangga, dan tenaga kerja). Sebagai contoh, untuk melihat perkembangan tingkat pemerataan, misalnya, maka disajikan data PDRB perkapita.

TABEL 14.**Produk Domestik Regional Bruto dan PDRB Perkapita
Kabupaten Badung, 2019-2023**


Uraian	2019	2020	2021	2022*	2023**
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
Nilai PDRB (Miliar Rp)					
- ADHB	62.836,11	49.026,03	44.882,08	55.290,00	68.397,56
- ADHK 2010	37.326,47	31.147,82	29.049,52	31.946,05	35.554,32
PDRB perkapita (Ribu Rp)					
- ADHB	92.561,23	89.311,98	81.197,79	99.075,37	121.416,51
- ADHK 2010	54.984,05	56.742,79	52.554,54	57.244,83	63.114,56
Pertumbuhan PDRB perkapita ADHK 2010 (%)	2,39	3,20	-7,38	8,92	10,25
Jumlah penduduk (000 org)	678,86	548,93	552,75	558,06	563,33
Pertumbuhan (%)	3,34	-19,14	0,70	0,96	0,94

Keterangan:

*) Angka Sementara


**) Angka Sangat Sementara

Pada tahun 2019 terlihat bahwa PDRB perkapita Kabupaten Badung mengalami peningkatan. Namun, kondisi berbeda pada tahun 2020 dimana PDRB perkapita Kabupaten Badung mengalami penurunan. Besaran PDRB perkapita Kabupaten Badung atas dasar harga berlaku pada tahun 2019 sebesar Rp. 92,56 juta, kemudian



menurun menjadi Rp. 89,31 juta pada tahun 2020. Tahun 2021 besaran PDRB perkapita atas dasar harga berlaku kembali menurun menjadi Rp. 81,20 juta. Setelah itu, pada tahun 2022 PDRB perkapita atas dasar harga berlaku mengalami peningkatan menjadi Rp. 99,08 juta dan kembali meningkat pada tahun 2023 menjadi Rp. 121,42 juta. Sedangkan berdasarkan atas harga konstan 2010, PDRB perkapita Kabupaten Badung meningkat dari Rp. 54,98 juta (2019) menjadi Rp. 56,74 juta (2020) dan menurun menjadi Rp. 52,55 juta pada tahun 2021. Kemudian pada periode 2022-2023 PDRB perkapita atas dasar harga konstan 2010 Kabupaten Badung mengalami peningkatan hingga menjadi Rp. 57,24 juta pada tahun 2022 dan Rp. 63,11 juta pada tahun 2023.

Pada kondisi normal, pertumbuhan PDRB perkapita didukung oleh adanya penambahan penduduk di Kabupaten Badung. Sebagaimana diketahui, Kabupaten Badung merupakan daerah tujuan migrasi yang disebabkan karena Kabupaten Badung dianggap sebagai daerah yang memiliki lapangan pekerjaan yang luas. Sebagai daerah destinasi pariwisata tentunya Kabupaten Badung membuka peluang kerja yang sangat besar dan menjadi incaran bagi pencari kerja baik penduduk Badung sendiri maupun penduduk luar Kabupaten Badung. Kumpulan penduduk ini melakukan aktivitas ekonomi sehingga menambah nilai tambah ekonomi di setiap lapangan usaha yang ada. Selain menambah nilai tambah dari tiap lapangan usaha, penduduk ini juga melakukan kegiatan konsumsi



yang tercermin pada PDRB pengeluaran. Namun adanya pandemi covid-19 membuat struktur ekonomi masyarakat berubah. Penduduk migran sebagian besar kembali ke daerah asal karena sudah tidak ada penghasilan akibat pariwisata yang tidak berjalan sebagaimana biasa. Sementara itu, pendapatan penduduk asli Bali yang masih tinggal di Kabupaten Badung mengalami penurunan terutama untuk pekerja pariwisata yang dirumahkan maupun diberhentikan karena perusahaan tempat bekerja mengalami kebangkrutan. Penurunan pendapatan ini menyebabkan daya beli masyarakat menurun yang berakibat pada menurunnya PDRB perkapita secara umum di Kabupaten Badung. Akan tetapi, kondisi ini kembali pulih pada tahun 2022 dimana perekonomian di Kabupaten Badung perlahan membaik sehingga daya beli masyarakat kembali meningkat meskipun secara riil kondisi perekonomian Kabupaten Badung saat ini belum dapat melebihi keadaan tahun 2019 atau pada tahun sebelum adanya pandemi.

Pertumbuhan PDRB perkapita dari tahun 2019-2023 mengalami fluktuasi. Pada tahun 2019 pertumbuhannya bernilai 2,39 persen. Selanjutnya pada tahun 2020 mengalami percepatan menjadi 3,20 persen. Sedangkan pada tahun 2021 PDRB perkapita berkontraksi sehingga menjadi -7,38 persen. Pada tahun 2022 PDRB perkapita Kabupaten Badung tumbuh pesat menjadi 8,92 persen dan kembali mengalami percepatan menjadi 10,25 persen pada tahun 2023.



4.2. Perbandingan Pengeluaran PDRB Untuk Konsumsi Akhir Rumah Tangga Terhadap Net Ekspor

Perbandingan ini merupakan salah satu indikator yang dapat menggambarkan seberapa besar produk yang dikonsumsi rumah tangga jika dibandingkan dengan selisih produk yang diekspor ke luar wilayah maupun produk impor yang masuk wilayah Kabupaten Badung.

Pada tahun 2019 perbandingan nilai konsumsi rumah tangga dengan nilai net ekspor adalah sebesar 2,19, yang artinya konsumsi rumah tangga lebih besar sebesar 2,19 kali dibandingkan dengan nilai net ekspor atau net ekspor lebih kecil 0,46 kali lipat jika dibandingkan konsumsi rumah tangga di Kabupaten Badung. Nilai net ekspor yang lebih kecil dari nilai konsumsi rumah tangga terjadi pada tahun 2019. Sedangkan pada periode tahun 2020 dan tahun 2021 net ekspor di Kabupaten Badung berkontraksi mencapai -248,29 kali dan -7,45 kali. Kemudian pada periode tahun 2022 dan tahun 2023 nilai konsumsi rumah tangga di Kabupaten Badung lebih besar 11,47 kali dan 2,79 kali dibandingkan dengan net ekspor.

TABEL 15.

Perbandingan PDRB Pengeluaran untuk Konsumsi Akhir
Rumah Tangga terhadap Net Ekspor 2019-2023


Uraian	2019	2020	2021	2022*	2023**
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
Total Konsumsi RT (ADHB) (Miliar Rp)	24.356,43	24.368,64	24.636,90	27.451,96	30.157,92
Total Net Ekspor (ADHB) (Miliar Rp)	11.140,40	-98,15	-3.308,39	2.394,29	10.816,59
Perbandingan Konsumsi RT terhadap Net Ekspor	2,19	-248,29	-7,45	11,47	2,79

Keterangan:

*) Angka Sementara

***) Angka Sangat Sementara

Nilai net ekspor Kabupaten Badung yang relatif kecil disebabkan karena Kabupaten Badung merupakan pengeksportor jasa terbesar sekaligus pengimpor barang dan jasa terbesar di Provinsi Bali. Ekspor jasa ini dapat berupa pelayanan jasa terhadap para wisatawan mancanegara maupun wisatawan domestik yang berasal dari luar Kabupaten Badung. Sementara kegiatan impor yang dilakukan oleh Kabupaten Badung merupakan impor barang yang digunakan untuk memenuhi kebutuhan tidak hanya untuk masyarakatnya tetapi juga untuk wisatawan yang datang ke Kabupaten Badung. Selain itu impor jasa juga dilakukan oleh Kabupaten Badung karena banyak pekerja dari luar Kabupaten Badung yang bekerja di Kabupaten Badung. Sementara pada tahun



2020, akibat pandemi covid 19 menyebabkan pariwisata Bali khususnya di Kabupaten Badung mengalami penurunan. Hal ini berdampak secara langsung terhadap penurunan ekspor impor barang dan jasa untuk wisatawan domestik maupun mancanegara.

4.3. Perbandingan Konsumsi Akhir Rumah Tangga Terhadap PMTB

Jika kita melihat besarnya rasio antara konsumsi rumah tangga dengan besarnya PMTB, akan terlihat besarnya perbandingan konsumsi akhir rumah tangga dengan besarnya investasi yang ada di Kabupaten Badung. Secara makro ekonomi, pembangunan ekonomi dikatakan baik jika penggerak pertumbuhan ekonomi adalah investasi, hal ini disebabkan karena dengan investasi maka akan menciptakan multiplier efek bagi ekonomi wilayah tersebut.

Perkembangan nilai perbandingan konsumsi akhir rumah tangga dengan PMTB di Kabupaten Badung cenderung sama dari tahun 2019 sampai 2023 seperti yang terlihat pada Tabel 16 di bawah. Nilai perbandingan konsumsi akhir rumah tangga dengan PMTB berkisar antara 1,08 sampai 1,36. Hal ini menunjukkan bahwa pengeluaran makro terhadap konsumsi rumah tangga selalu lebih besar dibandingkan terhadap pembentukan investasi di Kabupaten Badung. Namun perbedaan pengeluaran makro konsumsi rumah tangga dan investasi tidak terlalu besar.

TABEL 16.Perbandingan Konsumsi Rumah Tangga terhadap PMTB
2019-2023

Uraian	2019	2020	2021	2022*	2023**
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
Total Konsumsi RT (ADHB) (Miliar Rp)	24.356,43	24.368,64	24.636,90	27.451,96	30.157,92
Total PMTB (ADHB) (Miliar Rp)	22.461,08	19.929,40	18.938,83	20.612,00	22.116,28
Perbandingan Konsumsi RT thd PMTB	1,08	1,22	1,30	1,33	1,36

Keterangan:

*) Angka Sementara

**) Angka Sangat Sementara

4.4. Proporsi Konsumsi Akhir Terhadap PDRB

Yang dimaksud dengan konsumsi akhir adalah penggunaan berbagai produk barang dan jasa akhir (baik berasal dari produk domestik maupun impor), untuk menunjang aktivitas ekonomi. Pelaku konsumsi akhir meliputi rumah tangga, LNPRT, dan pemerintah. Walaupun ketiga institusi tersebut mempunyai fungsi yang berbeda dalam sistem ekonomi, tetapi sama-sama membelanjakan sebagian pendapatannya untuk tujuan konsumsi akhir.

TABEL 17.

Proporsi Total Penggunaan Konsumsi Akhir terhadap PDRB
Kabupaten Badung, 2019-2023


Uraian	2019	2020	2021	2022*	2023**
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
Konsumsi Akhir (ADHB) (Miliar Rp)					
a. Rumah tangga	24.356,43	24.368,64	24.636,90	27.451,96	30.157,92
b. LNPRT	327,84	321,11	329,61	378,31	448,84
c. Pemerintah	4.364,59	4.361,35	4.126,12	4.255,66	4.800,84
Jumlah	29.048,86	29.051,09	29.092,63	32.085,93	35.407,40
PDRB (ADHB) (Miliar Rp)					
	62.836,11	49.026,03	44.882,08	55.290,00	68.397,56
Proporsi	46,23	59,26	64,82	58,03	51,77

Keterangan:

*) Angka Sementara

**) Angka Sangat Sementara

Rata-rata separuh barang dan jasa yang berada di wilayah Kabupaten Badung digunakan untuk memenuhi permintaan konsumsi akhir pada periode lima tahun terakhir. Hal ini terlihat dari proporsi permintahan akhir yang berada pada kisaran 46,23 - 64,82 persen. Proporsi konsumsi akhir di Kabupaten Badung pada tahun 2019 hingga 2023 berfluktuasi. Pada tahun 2019 proporsi konsumsi akhir tidak mencapai separuh total PDRB Kabupaten Badung, hanya bernilai 46,23 persen. Sedangkan pada tahun 2020 mengalami peningkatan menjadi 59,26 persen dan mencapai 64,82 persen pada



tahun 2021. Kemudian pada tahun 2022 proporsi konsumsi akhir turun menjadi 58,03 persen dan kembali turun pada tahun 2023 menjadi 51,77 persen. Meskipun total nilai konsumsi akhir makin meningkat setiap tahunnya, namun proporsinya terhadap PDRB justru semakin mengalami penurunan, dengan kata lain laju peningkatan PDRB secara keseluruhan lebih tinggi dibandingkan konsumsi akhir.

4.5. Perbandingan Net Ekspor Terhadap PMTB

Dalam perekonomian makro, penambahan investasi dalam hal ini PMTB, secara tidak langsung dapat meningkatkan nilai net ekspor. Investasi yang terjadi di wilayah domestik Kabupaten Badung tentunya dapat meningkatkan kinerja ekspor yang tercermin dari nilai net ekspor yang positif. Misalnya saja penambahan investasi berupa barang modal di pertanian akan meningkatkan produksi pertanian itu sendiri sehingga selain akan dikonsumsi oleh penghuni domestik wilayah Badung, juga akan diperdagangkan ke luar wilayah Badung. Begitupula halnya jika terjadi pada lapangan usaha industri, dimana penambahan investasi di pabrik-pabrik dan wilayah industri lainnya tentunya akan meningkatkan produksi dari industri pengolahan, bisa berupa modal ataupun berupa penambahan mesin-mesin baru.

TABEL 18.

Rasio Net Ekspor terhadap PMTB (ADHB) 2019-2023

Uraian	2019	2020	2021	2022*	2023**
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
Net Ekspor (ADHB) (Miliar Rp)	11.140,40	-98,15	-3.308,39	2.394,29	10.816,59
Total PMTB (ADHB) (Miliar Rp)	22.461,08	19.929,40	18.938,83	20.612,00	22.116,28
Rasio Net Ekspor terhadap PMTB	0,50	-0,005	0,17	0,12	0,49

Keterangan:

*) Angka Sementara

**) Angka Sangat Sementara

Tabel 18. di atas menunjukkan bahwa nilai PMTB mengalami penurunan pada tahun 2020 dan 2021 kemudian mengalami peningkatan pada tahun 2022 dan tahun 2023. Seiring dengan kenaikan PMTB, nilai net ekspor Kabupaten Badung juga mengalami peningkatan. Investasi di bidang pariwisata tentunya membawa dampak besar terhadap perkembangan ekspor khususnya ekspor jasa di Kabupaten Badung. Walaupun demikian, fenomena yang terjadi di Badung adalah sebagian besar para investor di bidang pariwisata ini bukanlah penduduk Kabupaten Badung, melainkan penduduk wilayah luar Badung, sehingga keuntungan yang didapat sebagian mengalir ke luar wilayah Kabupaten Badung. Sementara pada tahun 2020 dan 2021, pandemi covid-19 menyebabkan perubahan besar terhadap perekonomian Kabupaten Badung dimana net ekspor terkontraksi dan PMTB berkurang.



4.6. Neraca Perdagangan (Trade Balance)

Transaksi devisa yang berasal dari perdagangan barang dan jasa dengan pihak luar Kabupaten Badung (non-residen) dapat dilihat melalui neraca perdagangan. Secara konsep, selisih antara nilai ekspor dan nilai impor disebut sebagai “**Ekspor Neto**”, apabila nilai ekspor lebih besar dari nilai impor, maka terjadi surplus, dan sebaliknya yang terjadi adalah defisit. Dilihat dari arus uang yang masuk atau keluar, apabila tingkat keseimbangan dalam posisi surplus, maka terjadi aliran devisa masuk, sebaliknya kalau posisinya defisit maka terjadi aliran devisa keluar. Dalam hal ini dapat dijelaskan bahwa kekuatan ekonomi suatu wilayah di antaranya ditentukan oleh proses tersebut.

Selain gambaran posisi neraca perdagangan, dapat juga dilihat perbandingan (rasio) antara nilai ekspor terhadap impor, meskipun hanya berlaku secara total. Namun rasio tersebut tidak dapat merefleksikan perbandingan menurut jenis komoditas, harga maupun kuantum. Apabila rasio lebih besar dari 1 (satu) maka nilai ekspor lebih tinggi daripada nilai impor, sebaliknya apabila rasio kurang dari 1 (satu) berarti nilai impor lebih tinggi dari pada nilai ekspor. Besar kecilnya ekspor atau impor suatu wilayah sangat tergantung kepada kondisi ekonomi serta kebutuhan masyarakatnya.

TABEL 19.**Neraca Perdagangan Barang dan Jasa, Kabupaten Badung
2019-2023**

Uraian	2019	2020	2021	2022*	2023**
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
Net ekspor (X – M) (Miliar Rp)	11.140,40	-98,15	-3.308,39	2.394,29	10.816,59
Rasio Net Ekspor thdp PDRB	17,73	-0,20	-7,37	4,33	15,81

Keterangan:

*) Angka Sementara

**) Angka Sangat Sementara

Tabel 19. menunjukkan neraca perdagangan barang dan jasa Kabupaten Badung pada tahun 2019 mengalami surplus neraca perdagangan. Hal ini disebabkan karena nilai impor lebih kecil dibandingkan nilai ekspor, sehingga terjadi aliran dana devisa masuk dari luar wilayah Badung menuju dalam wilayah Badung. Besaran net ekspor Kabupaten Badung pada tahun 2019 adalah Rp. 11.140,40 miliar. Sedangkan pada tahun 2020 dan 2021 neraca perdagangan barang dan jasa mengalami defisit. Hal ini disebabkan oleh pandemi covid-19 yang menyebabkan ekspor barang dan jasa kepada wisatawan mengalami hambatan. Akibatnya net ekspor Kabupaten Badung tahun 2021 berkontraksi hingga menjadi Rp. -3.308,39 miliar. Kemudian pada periode tahun 2022 hingga tahun 2023, net ekspor Kabupaten Badung kembali bernilai positif masing-masing sebesar Rp. 2.394,29 miliar dan Rp. 10.816,59 miliar.

4.7. Incremental Capital Output Ratio (ICOR)

Salah satu indikator yang dapat diturunkan dari penghitungan PDRB pengeluaran adalah besaran ICOR (*Incremental Capital Output Ratio*). Besaran ini dapat menggambarkan rasio investasi kapital/modal terhadap hasil yang diperoleh (output) dengan menggunakan investasi tersebut. ICOR juga bisa diartikan sebagai dampak penambahan kapital terhadap penambahan sejumlah output (keluaran). Dengan kata lain dapat diartikan secara lebih sederhana yaitu suatu besaran yang menggambarkan seberapa besar investasi yang diperlukan untuk menaikkan pertumbuhan ekonomi suatu wilayah.

Formula :

$$ICOR = \frac{\Delta K}{\Delta Y} = \frac{I}{\Delta Y} = \frac{I_t}{Y_t - Y_{t-1}}$$

Di mana: I_t = PMTB tahun ke t

Y_t = Output tahun ke t

Y_{t-1} = Output tahun ke t-1

Dari Tabel 20., dapat dilihat bahwa pada tahun 2019 besaran ICOR di Kabupaten Badung senilai 7,51. Hal ini dapat dikatakan bahwa untuk setiap penambahan satu miliar nilai output (keluaran) akan membutuhkan penambahan kapital sebanyak 7,51 miliar pada tahun 2019. Setelah itu, nilai ICOR tidak tersedia pada tahun 2020 dan tahun 2021 akibat adanya pandemi covid-19. Kemudian pada tahun 2022 dan tahun 2023 nilai ICOR di Kabupaten Badung masing-masing sebesar 4,37 dan 3,64. Hal ini menunjukkan bahwa untuk setiap penambahan satu miliar nilai output (keluaran) akan membutuhkan penambahan kapital sebanyak 4,37 miliar pada tahun 2022 dan 3,64 miliar pada tahun 2023.

TABEL 20.

Incremental Capital Output Ratio Kabupaten Badung, 2019-2023

Uraian	2019	2020	2021	2022*	2023**
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
PDRB (ADHK 2010) (miliar rupiah)	37.326,47	31.147,82	29.049,52	31.946,05	35.554,32
Perubahan (miliar rupiah)	2.051,05	-6.178,65	-2.098,30	2.896,53	3.608,28
PMTB (ADHK 2010) (miliar Rp)	15.403,79	13.412,63	12.342,13	12.659,14	13.131,95
ICOR	7,51	n.a	n.a	4,37	3,64

Keterangan:

*) Angka Sementara

**) Angka Sangat Sementara



Bab 5


Penutup

<https://adungkab.bps.go.id>




5.1 KESIMPULAN

Pertumbuhan ekonomi Kabupaten Badung pada tahun 2023 sebesar 11,29 persen meningkat 1,32 persen dibandingkan tahun sebelumnya. Pertumbuhan ekonomi Kabupaten Badung sempat mengalami kontraksi selama dua tahun sebesar -6,74 persen pada tahun 2021 dan sebesar -16,55 persen pada tahun 2020 akibat pandemi covid-19. Provinsi Bali khususnya Kabupaten Badung merupakan salah satu wilayah yang terkena dampak besar akibat pandemi. Sebagai salah satu destinasi pariwisata yang terkenal hingga mancanegara, kondisi ekonomi Kabupaten Badung terkena dampak langsung setelah adanya pandemi. Namun setelah kebijakan penutupan bandara dan pelabuhan dicabut, kondisi perekonomian Kabupaten Badung mulai pulih kembali. Sektor pariwisata dan penunjang pariwisata yang tutup sementara akibat pandemi mulai buka kembali. Sehingga pendapatan kembali meningkat, diiringi dengan peningkatan daya beli masyarakat. Dampaknya adalah pertumbuhan ekonomi Kabupaten Badung bernilai menyentuh dua digit sebesar 11,29 persen pada tahun 2023. Pertumbuhan ekonomi Kabupaten Badung juga kembali mendapatkan peringkat tertinggi diantara kabupaten/kota lain di Provinsi Bali, dibandingkan pada saat pandemi pertumbuhan ekonomi Kabupaten Badung sempat menempati posisi terendah dibandingkan kabupaten/kota lain di Provinsi Bali.



Besaran nominal PDRB Kabupaten Badung atas dasar harga berlaku pada tahun 2022 sebesar Rp. 55,29 triliun atau Rp 31,95 triliun atas dasar harga konstan 2010. Sedangkan pada tahun 2023 besaran nominal PDRB Kabupaten Badung atas dasar harga berlaku sebesar Rp. 68,40 triliun atau Rp. 35,55 triliun atas dasar harga konstan 2010. Pendapatan PDRB perkapita Kabupaten Badung pada tahun 2023 mengalami kenaikan dibandingkan tahun 2022. Walaupun demikian, angka ini belum dapat menggambarkan kesejahteraan masyarakat yang tinggal di Kabupaten Badung karena PDRB diperoleh dengan menghitung aktivitas ekonomi di wilayah Kabupaten Badung tanpa melihat asal input ekonomi yang terjadi.

Kontribusi dominan untuk PDRB Kabupaten Badung tahun 2023 adalah dari komponen konsumsi akhir rumah tangga dan pembentukan modal tetap domestik bruto. Masing-masing memberikan sumbangan sebesar 44,09 persen dan 32,33 persen. Dilihat dari perdagangan luar wilayah, nilai ekspor untuk tahun 2023 lebih besar daripada nilai impor sebesar 15,81 persen. Kabupaten Badung merupakan destinasi pariwisata terbesar di Bali. Setelah meredanya pandemi covid-19 dengan dibukanya kembali bandara untuk domestik maupun internasional, proses ekspor jasa kepada para wisatawan kembali pulih. Hal ini menyebabkan net ekspor Kabupaten Badung mulai tahun 2022 bernilai positif kembali.




Nilai *Incremental Capital Output Ratio* (ICOR) Kabupaten Badung tahun 2023 adalah sebesar 3,64. Nilai ICOR ini menunjukkan seberapa besar investasi yang diperlukan untuk menaikkan pertumbuhan ekonomi suatu wilayah. Dengan demikian, untuk menaikkan satu miliar nilai output Kabupaten Badung dibutuhkan tambahan investasi sebesar 3,64 miliar pada tahun 2023.

5.2 Saran

Peningkatan pertumbuhan ekonomi salah satunya dapat dilakukan dengan menambah investasi. Dari nilai ICOR dimana untuk menambah satu miliar output Kabupaten Badung membutuhkan tambahan sekitar tiga miliar investasi. Investasi dapat dilakukan salah satunya pada pemulihan sektor pariwisata di masa pasca pandemi covid-19 setelah dua tahun banyak yang tutup sementara maupun permanen. Kabupaten Badung merupakan salah satu destinasi pariwisata terbesar di Bali. Untuk itu kualitas pariwisata Kabupaten Badung harus selalu ditingkatkan karena memiliki peluang yang besar untuk melakukan ekspor jasa kepada para wisatawan. Beberapa hal yang bisa dilakukan para pelaku pariwisata adalah menyediakan berbagai macam paket maupun promo menarik terhadap produknya karena persaingan usaha sudah mulai normal dengan dibukanya kembali usaha maupun adanya muncul usaha baru.

Selain itu, pola konsumsi masyarakat yang masih mengandalkan produk luar daerah juga perlu mendapat perhatian. Perlu upaya untuk memperbaiki kualitas produk sendiri. Selain itu,



sosialisasi terhadap masyarakat untuk membudayakan mengkonsumsi produk-produk yang dihasilkan oleh wilayah Badung sendiri juga perlu menjadi perhatian bersama. Dengan demikian Kabupaten Badung dapat mempertahankan nilai ekspornya yang lebih besar dibandingkan dengan nilai impornya.

<https://badungkab.bps.go.id>



Lampiran

<https://bptungkab.bps.go.id>

Lampiran 1.

Produk Domestik Regional Bruto Atas Dasar Harga Berlaku
Menurut Pengeluaran Kabupaten Badung,
2019-2023 (Dalam Miliar Rupiah).

Komponen Pengeluaran	2019	2020	2021	2022*	2023**
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1. Konsumsi Rumah Tangga	24 356,43	24 368,64	24 636,90	27 451,96	30 157,92
2. Konsumsi LNPRT	327,84	321,11	329,61	378,31	448,84
3. Konsumsi Pemerintah	4 364,59	4 361,34	4 126,12	4 255,66	4 800,63
4. PMTB	22 461,08	19 929,40	18 938,83	20 642,00	22 116,28
5. Perubahan Inventori	185,77	143,68	159,01	167,78	57,30
6. Net Ekspor	11 140,40	-98,15	-3 308,39	2 394,29	10 816,59
Total PDRB	62 836,11	49 026,03	44 882,08	55 290,00	68 397,56

* Angka Sementara

** Angka Sangat Sementara

Lampiran 2.

Produk Domestik Regional Bruto Atas Dasar Harga Konstan 2010 Menurut Pengeluaran Kabupaten Badung, 2019-2023 (Dalam Miliar Rupiah)

Komponen Pengeluaran	2019	2020	2021	2022*	2023**
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1. Konsumsi Rumah Tangga	16 414,86	15 705,04	15 735,72	16 410,67	17 426,00
2. Konsumsi LNPRT	195,20	190,11	192,83	215,13	245,87
3. Konsumsi Pemerintah	2 625,48	2 554,68	2 451,10	2 465,31	2 686,84
4. PMTB	15 403,78	13 412,62	12 342,13	12 659,14	13 131,94
5. Perubahan Inventori	67,36	60,62	76,75	78,75	26,37
6. Net Ekspor	2 619,77	-775,25	-1 749,00	117,05	2 037,29
Total PDRB	37 326,47	31 147,82	29 049,52	31 946,05	35 554,32

* Angka Sementara

** Angka Sangat Sementara

Lampiran 3.

Distribusi Persentase Produk Domestik Regional Bruto
Atas Dasar Harga Berlaku Menurut Pengeluaran
Kabupaten Badung,
2019-2023 (dalam Persen)

Komponen Pengeluaran	2019	2020	2021	2022*	2023**
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1. Konsumsi Rumah Tangga	38,76	49,71	54,89	49,65	44,09
2. Konsumsi LNPR	0,52	0,65	0,73	0,68	0,66
3. Konsumsi Pemerintah	6,95	8,90	9,19	7,70	7,02
4. PMTB	35,75	40,65	42,20	37,33	32,33
5. Perubahan Inventori	0,30	0,29	0,35	0,30	0,08
6. Net Ekspor	17,73	-0,20	-7,37	4,33	15,81
Total PDRB	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

* Angka Sementara

** Angka Sangat Sementara

Lampiran 4.

Laju Pertumbuhan Produk Domestik Regional Bruto Atas Dasar Harga Konstan 2010 Menurut Pengeluaran, Kabupaten Badung 2019-2023 (dalam persen)

Komponen Pengeluaran	2019	2020	2021	2022*	2023**
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1. Konsumsi Rumah Tangga	5,44	-4,32	0,20	4,29	6,19
2. Konsumsi LNPRT	10,89	-2,61	1,43	11,56	14,29
3. Konsumsi Pemerintah	2,87	-2,70	-4,05	0,58	8,99
4. PMTB	4,11	-12,93	-7,98	2,57	3,73
5. Perubahan Inventori	-	-	-	-	-
6. Net Ekspor	-	-	-	-	-
PDRB	5,81	-16,55	-6,74	9,97	11,29

* Angka Sementara

** Angka Sangat Sementara

Lampiran 5.

Indeks Harga Implisit Produk Domestik Regional Bruto (2010=100) Menurut Pengeluaran, Kabupaten Badung 2019-2023

Komponen Pengeluaran	2019	2020	2021	2022*	2023**
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1. Konsumsi Rumah Tangga	148,38	155,16	156,57	167,28	173,06
2. Konsumsi LNPRT	167,94	168,91	170,93	175,85	182,55
3. Konsumsi Pemerintah	166,24	170,72	168,34	172,62	178,67
4. PMTB	145,82	148,59	153,45	163,06	168,42
5. Perubahan Inventori	275,77	237,02	207,19	213,06	217,28
6. Ekspor	140,35	138,79	125,86	179,51	196,20
7. Impor	121,58	126,74	139,36	170,46	178,78
Total PDRB	168,34	157,40	154,50	173,07	192,37

* Angka Sementara

** Angka Sangat Sementara

Lampiran 6.

Laju Pertumbuhan Indeks Harga Implisit Produk Domestik Regional Bruto (2010=100) Menurut Pengeluaran, Kabupaten Badung 2019-2023

Komponen Pengeluaran	2019	2020	2021	2022*	2023**
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1. Konsumsi Rumah Tangga	2,66	4,57	0,90	6,84	3,46
2. Konsumsi LNPRT	2,57	0,57	1,20	2,88	3,81
3. Konsumsi Pemerintah	1,37	2,70	-1,40	2,55	3,50
4. PMTB	0,67	1,90	3,27	6,26	3,28
5. Perubahan Inventori	-	-	-	-	-
6. Net Ekspor	-	-	-	-	-
Total PDRB	2,75	-6,50	-1,84	12,02	11,15

* Angka Sementara

** Angka Sangat Sementara



DAFTAR PUSTAKA

European Communities, International Monetary Fund, Organisation for Economic Co-operation and Development, United Nations and World Bank. 2009. *System of National Accounts 2008*.

Badan Pusat Statistik. 2009. *Sistem Neraca Nasional 2008*.

Sutomo, Slamet. 2015. *Sistem Data dan Perangkat Analisis Ekonomi Makro*.

ST 2023
SENSUS PERTANIAN

BerAKHLAK
Berorientasi Pelayanan Akuntabel Kompeten
Harmonis Loyal Adaptif Kolaboratif

**# bangga
melayani
bangsa**

DATA

MENCERDASKAN BANGSA



**BADAN PUSAT STATISTIK
KABUPATEN BADUNG**

Jl. Raya Darmasaba No. 28, Abiansemal, Badung

Telp: (0361) 8441616, Fax: (0361) 8441717

Homepage: <http://badungkab.bps.go.id>

E-mail: bps5103@bps.go.id